

SKRIPSI

EFEKTIFITAS SISTEM PENDISTRIBUSIAN RASKIN (BERAS BERSUBSIDI UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN) DI KELURAHAN SOREK SATU KECAMATA PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



OLEH:

SRI WAHYU NINGSIH
NIM.10975005781

PROGRAM S1

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
RIAU
2013**

ABSTRAK

EFEKTIFITAS SISTEM PENDISTRIBUSIAN RASKIN (BERAS BERSUBSIDI UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN) DI KELURAHAN SOREK SATU KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN

Oleh :

Sri Wahyu Ningsih

NIM. 10975005781

Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran/tujuan yang telah di tentukan sebelumnya. Jelasnya, bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang di rencanakan sebelumnya adalah efektif.

Penelitian ini di lakukan di kelurahan Sorek Satu kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakan sistem pendistribusian Raskin di kelurahan Sorek Satu, faktor-faktor apakah yang menyebabkan kurang efektifnya sistem pendistribusian Raskin dan bagaimanakah upaya pemerintah kelurahan untuk meningkatkan efektifitas pendistribusian Raskin di kelurahan Sorek Satu. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah sistem pendistribusian Raskin di kelurahan Sorek Satu, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kurang efektifnya sistem pendistribusian Raskin di kelurahan Sorek Satu dan untuk mengetahui upaya pemerintah kelurahan sorek satu untuk meningkatkan sistem pendistribusian Raskin di kelurahan Sorek Satu. Dan jumlah responden yang diambil dalam penelitian 203 responden yang merupakan RTM yang terdaftar di DPM.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, queisioner, analisis data, pengumpulan data dan observasi. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, dan ditabulasi sesuai dengan susunan sajian data yang di butuhkan untuk menjawab masing-masing masalah, lalu memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan, kemudian diambil kesimpulan dan saran yang konkrit untuk mengatasi permasalahan pendistribusian Raskin di kelurahan Sorek Satu.

Dalam penelitian ini, efektifitas sistem pendistribusian Raskin di kelurahan sorek satu dilihat dari pedoman umum Raskin yang di terbitkan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan pedoman umum Raskin kabupaten Pelalawan yang di terbitkan oleh Bupati Pelalawan dari kedua peraturan tersebut di dalamnya tepatnya dalan Bab 5 di jelaskan indikator dari kinerja program Raskin ada 6 yaitu : tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat

harga dan tepat administrasi . Dari hasil pengukuran terhadap masing-masing indikator penelitian yang dilakukan, maka dapat di nyatakan bahwa efektifitas sistem pendistribusiana Raskin di kelurahan Sorek Satu kurang Terlaksana Dengan Baik Hal ini di karenakan oleh beberapa faktor yaitu : karakteristik organisasi pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik, sumber daya, sikap agen pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi Terkait Dan Kegiatan-kegiatan Pelaksana, Standar Dan Sasaran Kebijakan/Ukuran Dan Tujuan Kebijakan. Dan dari penelitian yang penulis lakukan, bahwa pemerintah kelurahan Sorek Satu belum mampu melakukan upaya untuk meningkatkan efektifitas pendistribusian Raskin di kelurahan Sorek Satu, karena di indikasikan pemerintah kelurahan kurang inovatif untuk mencari solusi dalam mengatasi permasalahan pendistribusian Raskin di kelurahan Sorek Satu.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
---------------------	---

DAFTAR ISI.....	v
-----------------	---

DAFTAR TABEL	vii
--------------------	-----

DAFTAR GAMBAR.....	ix
--------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
----------------------------------	---

1.2 Perumusan Masalah	7
-----------------------------	---

1.3 Tujuan Penelitian	7
-----------------------------	---

1.4 Manfaat Penelitian	8
------------------------------	---

1.5 Sistematika Penulisan	9
---------------------------------	---

BAB II TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Efektifitas	11
----------------------------------	----

2.2 Pendekatan Efektifitas	16
----------------------------------	----

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi kebijakan.....	17
--	----

2.4 Kriteria Pengukuran Efektifitas	23
---	----

2.5 Penilaian Terhadap Efektifitas.....	28
---	----

2.6 Sistem Pendistribusian.....	36
---------------------------------	----

2.7 Indikator Kemiskinan.....	38
-------------------------------	----

2.8 Program Raskin	44
--------------------------	----

2.9 Tujuan Raskin.....	48
------------------------	----

2.10 Prinsip Pengelolaan.....	49
-------------------------------	----

2.11 Pembiayaan Operasional.....	60
----------------------------------	----

2.12 Pandangan Islam Tentang Efektifitas Pendistribusia Raskin.....	63
--	----

2.13 Hipotesa.....	68
--------------------	----

2.14 Definisi konsep.....	68
---------------------------	----

2.15 Konsep operasional.....	69
------------------------------	----

2.16 Kerangka Berpikir.....	71
-----------------------------	----

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Dan waktu Penelitian.....	72
3.2 Jenis Dan Sumber Data.....	72
3.3 Metode Pengumpulan Data	73
3.4 Populasi Dan Sampel.....	73
3.5 Metode Analisis.....	74

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kelurahan Sorek Satu.....	76
4.2 Batas Wilayah.....	77
4.3 Visi dan Misi Kelurahan Sorek Satu.....	77
4.4 Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki Oleh Kantor Kelurahan Sorek Satu.....	78
4.5 Kondisi Wilayah.....	79
4.6 Kondisi Demografi.....	79
4.7 Mata Pencarian Penduduk Kelurahan Sorek Satu.....	80
4.8 Tingkat Kepercayaan Penduduk Kelurahan Sorek Satu.....	80
4.9 Tingkat Perkembangan Pendidikan dan Perekonomian di Kelurahan Sorek Satu.....	81
4.10 Perum Bulog.....	83
4.11 Sejarah Perusahaan.....	84
4.12 Tugas Pokok dan Fungsi.....	89

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden.....	92
5.2 Sistem Pendistribusian Raskin (Beras Bersubsidi Untuk Rumah Tangga Miskin) Di Kelurahan Sorek Satu.....	97
5.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas sistem pendistribusian Raskin di kelurahan Sorek Satu.....	121
5.4 Upaya Pemerintah Kelurahan Dalam Meningkatkan Efektifitas Pendistribusian Raskin Di Kelurahan Sorek Satu.....	132
5.5 Rekapitulasi Jawaban Responden.....	133

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan.....	135
6.2 Saran	137

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah sosial laten yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Negara berkembang seperti Indonesia. Berbagai teori dan pengembangan pun terus menerus di kembangkan untuk mengatasi kemiskinan ini. Karena kini gejala kemiskinan terus meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia. Krisis telah membawa Indonesia pada peningkatan angka kemiskinan terutama sebagai efek dari gejolak krisis moneter maka pemerintah menggulirkan berbagai kebijakan di antaranya adalah BLT (Bantuan Langsung Tunai), KUR (Kredit Usaha Rakyat), JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat), Program Keluarga Harapan, Dana BOS serta Raskin.

Program Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) merupakan program nasional yang bertujuan untuk membantu memenuhi kecukupan pangan dan mengurangi beban finansial rumah tangga miskin (RTM) melalui penyediaan beras bersubsidi . Sejak tahun 2007, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) menjadi koordinator pelaksana program Raskin untuk pendistribusian beras, Badan Urusan Logistik (BULOG) bertanggung jawab mendistribusikan dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyalurkan beras dari titik distribusi kepada RTM . (*www.digilib.itb.ac.id di akses pada tanggal 11 April 2012*)

Program Raskin pada dasarnya merupakan Program Operasi Pasar Khusus (OPK) yang di luncurkan pada Juli 1998 di bawah Program Jaring Pangan Sosial (JPS). Selama 14 tahun pelaksanaan program Raskin, berbagai pihak telah melakukan evaluasi dan hasilnya telah memberikan input bagi perbaikan konsep dan pelaksanaan program Raskin. Beberapa penyesuaian yang dilakukan antara lain meliputi perubahan nama, jumlah beras per rumah tangga, frekuensi distribusi, sumber dan jenis data, sasaran penerima manfaat dan penyediaan lembaga pendamping.

Pada tahun 2002 pemerintah mengganti nama OPK menjadi program Raskin agar lebih mencerminkan sifat program, yakni sebagai program perlindungan sosial bagi RTM, tidak lagi sebagai program darurat penanggulang dampak krisis ekonomi. Penetapan jumlah beras per bulan per RTM pada awalnya 10 kg, selama beberapa tahun kemudian bervariasi dari 10 kg-20 kg . Dan pada tahun 2007 kembali menjadi 10 kg. Frekuensi distribusi yang pada tahun 2005 12 kali per tahun , pada tahun 2006 berkurang menjadi 10 kali per tahun dan pada tahun-tahun seterusnya sampai tahun 2011 tetap 12 kali per tahun.

Sasaran penerima manfaat yang sebelumnya menggunakan data Keluarga Prasejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera 1 (KS-1) hasil pendekatan BKKBN. Sejak tahun 2006 hingga saat ini berubah menggunakan data RTM hasil BPS (www.pnpm-mandiri.org/elibrary/download.phd?id=15 Di akses pada tanggal 11 April 2012)

Raskin merupakan program nasional yang menyentuh seluruh wilayah Indonesia termasuk Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Namun dalam sistem pendistribusiannya belum maksimal dan sesuai prosedur yang berlaku. Tujuan mulia pemerintah ini tidak luput dari penyimpangan. Menurut pantauan penulis ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam pendistribusian Raskin di Kelurahan Sorek Satu ini. Diantaranya pertama, jumlah beras yang di bagikan sering tidak sesuai dengan apa yang telah di tetapkan dalam Pedoman Umum Raskin.

Tabel 1.1 : Jumlah Jatah Raskin /RTM

NO	TAHUN	ALOKASI / RTM	REALISASI
1.	2006	45 kg/3 Bln	20 kg/3Bln
2.	2007	30 kg/3 Bln	20 kg/3Bln
3.	2008	45 kg/3 Bln	25 kg/3Bln
4.	2009	45 kg/3 Bln	20 kg/3 Bln
5.	2010	45 kg/3Bln	20 kg/3 Bln
6.	2011	45 kg/3 Bln	25 kg/3 Bln

Sumber :Kantor Kelurahan Sorek Satu (2012)

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa adanya pengurangan jumlah penerimaan jatah Raskin yang harus di terima RTM di Kelurahan Sorek Satu, di kelurahan sorek satu Tiap RTM yang terdaftar di DPM harus ikhlas berbagi dengan yang lain karena ada beberapa masyarakat yang menuntut agar mendapatkan beras Raskin juga padahal mereka tidak terdaftar di DPM, seharusnya RTM yang terdata di DPM mendapat 45 kg/3 bulannya namun yang

terjadi di lapangan tiap RTM hanya mendapat beras Raskin 20 kg/3 bulannya. Hal ini mengindikasikan terjadinya pengurangan hak RTM yang ada sehingga beras Raskin yang di anggap dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga miskin belum tercapai.

Permasalahan kedua, frekuensi pendistribusian Raskin sejak juli 1998, pagu alokasi Raskin di distribusikan 12 kali dalam 1 tahun kecuali pada tahun 2006 hanya 10 kali dalam satu tahun. Tetapi yang terjadi di Kelurahan Sorek Satu tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah di tetapkan. Pendistribusian Raskin hanya di lakukan sebanyak 3-4 kali dalam 1 tahun, ini berarti pendistribusian hanya di lakukan 3-4 bulan sekali. Di tambah lagi dengan jadwal pendistribusian yang tidak dapat di tentukan sehingga RTM penerima manfaat Raskin tidak dapat memperkirakan kapan mereka akan mendapatkan Raskin.

Tabel 1.2 : Frekuensi Distribusi Beras Raskin / Tahun Berdasarkan Pedoman Umum Raskin

NO	TAHUN	FREKUENSI /TAHUN
1.	1998/1999	9
2.	1999/2000	12
3.	2000	9
4.	2001	12
5.	2002	12
6.	2003	12
7.	2004	12
8.	2005	12

9.	2006	10
10.	2007	12
11.	2008	12
12.	2009	12
13.	2010	12
14.	2011	12

Sumber : Lembaga Penelitian SMERU yang berjudul Efektifitas Pelaksanaan Raskin (2008) dan pedoman umum Raskin yang di terbitkan oleh Menko Kesra 2009-2011 Raskin (2008)

Mari kita bandingkan dengan tabel frekuensi pendistribusian Raskin yang ada di Kelurahan Sorek Satu.

Tabel 1.3 : Frekuensi Pendistribusian Raskin di Kelurahan Sorek Satu

NO	TAHUN	TARGET (TAHUN)	REALISASI (TAHUN)
1.	2006	10 kali/tahun	6 kali/tahun
2.	2007	12 kali/tahun	4kali/tahun
3.	2008	12 kali /tahun	4 kali/tahun
4.	2009	12 kali/tahun	4 kali/tahun
5.	2010	12 kali/tahun	4 kali/tahun
6.	2011	12 kali/tahun	5 kali/tahun

Sumber : Kantor Camat Pangkalan Kuras (2012)

Jika di bandingkan banyak sekali perbedaan dari target yang di tentukan dalam pedoman umum Raskin. Frekuensi pendistribusian yang bervariasi membuat masyarakat tidak dapat memastikan kapan mereka akan mendapatkan jatah Raskin. Jadi jika tujuan Raskin adalah untuk mengurangi pengeluaran

finansial dari keluarga miskin, hal ini belum tercapai dengan baik karena belum tentu mereka mendapatkan Raskin tiap bulannya.

Permasalahan ketiga, seharusnya Raskin disalurkan atau dijual kepada keluarga-keluarga miskin, ternyata banyak juga yang jatuh pada kelompok masyarakat lain yang bukan termasuk masyarakat yang memiliki kriteria untuk mendapat Raskin. Salah sasaran ini di karenakan oleh human error, dimana petugas lapangan atau oknum-oknum di Kelurahan Sorek Satu malah membagi-bagikan Raskin pada keluarga dekat atau kerabat dekatnya. Menurut lembaga penelitian SMERU (*dalam www.ppk.or.id di akses pada tanggal 11 April 2012*) mengatakan bahwa RASKIN menjangkau 52,6% rumah tangga miskin, namun rumah tangga tidak miskin yang terjangkau juga relatif tinggi yakni 36,9%. Bahkan Word Bank melaporkan lebih banyak rumah tangga tidak miskin yang menerima Raskin.

Permasalahan ke empat, berhubungan dengan masalah sebelumnya yakni kesalahan jumlah keluarga miskin penerima Raskin . Hal ini di sebabakan akibat buruknya koordinasi antara Ketua RT (Rukun Tetangga) di Kelurahan Sorek Satu. Karena di Kelurahan Sorek Satu pembagian Raskin di lakukan langsung oleh Ketua RT yang bersangkutan . Akibatnya jumlah keluarga miskin yang terdata lebih sedikit dari yang sebenarnya. Dari hasil wawancara dengan Kasi Ketentraman dan Ketertiban sebagai pelaksana distribusi Raskin di Kelurahan Sorek Satu bahwa Pemerintah tingkat kelurahan memiliki wewenang untuk mengadakan Muskel (Musyawarah Kelurahan) di awal tahun yang di hadiri oleh Ketua RT untuk menentukan RTM yang berhak menerima Raskin, dalam Muskel

ini sering kali terjadi kendala dalam menentukan RTM karena mereka tidak begitu mengetahui indikator atau kriteria penerima manfaat Raskin . Hal ini lah yang menjadi masalah dalam penetapan jumlah penerima Raskin. Menurut lembaga penelitian SMERU hal ini merupakan kelemahan utama dalam program Raskin.

Permasalahan ke lima, masalah pembayaran Raskin. Dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat kelurahan sorek satu yang mendapatkan Raskin, di ketahui bahwa masyarakat umumnya membayar tunai sebelum Raskin datang. Jika tidak membayar sebelum Raskin datang maka jatahnya akan ditawarkan pada orang lain yang bahkan tidak termasuk kriteria penerima Raskin. Ini di rasa sangat memberatkan, jika penerima Raskin memiliki uang saat pembayaran maka tidak menjadi masalah tetapi jika penerima Raskin tidak memiliki uang saat pembayaran maka mereka tidak dapat menikmati manfaat Raskin itu sendiri.

Dari beberapa permasalahan tersebut dapat di simpulkan bahwa penyaluran raskin sangat rentan terhadap penyelewengan bahkan manipulasi. Dengan banyaknya permasalan Raskin di Kelurahan Sorek Satu ini maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “ Efektivitas Sistem Pendistribusian Raskin (Beras Bersubsidi Untuk Rumah Tangga Miskin) di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan “

1.2 Perumusan Masalah

Untuk mempermudah penelitian ini nantinya dan agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan data ke dalam penulisan skripsi, maka terlebih dahulu di rumuskan permasalahan yang akan

diteliti. Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah sistem pendistribusian Raskin di Kelurahan Sorek Satu?
2. Faktor- faktor apakah yang menyebabkan kurang efektifnya sistem pendistribusian Raskin di Kelurahan Sorek Satu?
3. Bagaimanakah upaya pemerintah Kelurahan Sorek Satu dalam meningkatkan efektifitas sistem pendistribusian Raskin di Kelurahan Sorek Satu?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem pendistribusian Raskin di Kelurahan Sorek Satu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kurang efektifnya sistem pendistribusian Raskin di Kelurahan Sorek Satu.
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah Kelurahan Sorek Satu dalam meningkatkan efektifitas sistem pendistribusian Raskin di Kelurahan Sorek Satu.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah:

a. Manfaat bagi penulis

Penulisan penelitian ini dapat menambah wawasan serta memperluas cakrawala serta khasanah pemikiran penulis sendiri

b. Menambah referensi

Semoga penelitian ini dapat menambah referensi di perpustakaan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau khususnya untuk jurusan Administrasi Negara

c. Rekomendasi atau masukan bagi tempat penelitian

Di harapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan serta dapat memecahkan permasalahan yang ada ditempat penelitian sehingga di kedepannya lebih baik lagi

d. Referensi bagi penelitian berikutnya

Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti lain yang ingin meneliti di bidang yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, penulis ke dalam enam bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang diteliti antara lain Pengertian Efektifitas, dan sistem pendistribusian, dan Program Raskin.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, Metode Pengumpulan Data, Populasi , Sampel dan metode analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang keadaan umum kondisi geografis dan monografi Kelurahan Sorek Satu, sejarah kebijakan Raskin, sejarah Perum Bulog, kewenangan , tugas pokok dan fungsi Perum Bulog.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini memuat hasil dari penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Konsep efektifitas sesungguhnya merupakan suatu konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Konsep efektifitas ini oleh para ahli belum ada keseragaman pandangan, dan hal tersebut dikarenakan sudut pandang yang dilakukan dengan pendekatan disiplin ilmu yang berbeda, sehingga melahirkan konsep yang berbeda pula di dalam pengukurannya. Namun demikian, banyak juga ahli dan peneliti yang telah mengungkapkan apa dan bagaimana mengukur efektifitas itu.

Menurut Gunawan, adi dalam kamus besar bahasa Indonesia (2003:113) menjelaskan bahwa efektifitas lebih bermakna pada hasil guna, yaitu hasil dari suatu kegiatan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan pengertian yang di kemukakan diatas, efektifitas lebih menitik beratkan hasil dari pada kegiatan yang dilaksanakan . Jika kegiatan yang di laksanakan berhasil maka kegiatan tersebut di katakan efektif.

Pengertian yang sama juga di kemukakan oleh Kumorotomo, wahyudi (2005:365) efektifitas merupakan suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, berhasil tidaknya suatu pekerjaan itu dilakukan .

Di sini efektifitas di definisikan sebagai tolak ukur terhadap penyelesaian suatu pekerjaan, dapat di katakan mencapai efektifitas apabila pekerjaan tersebut dapat mencapai tujuannya.

Pengertian efektifitas yang lain juga di kemukakan oleh Sigit, Soehardi (2003:2) efektifitas adalah ukuran sejauh mana tujuan (organisasi) dapat dicapai. Efektifitas adalah suatu kontinum yang merentang dari efektif, kurang efektif, sedang-sedang, sangat kurang, sampai tidak efektif.

Pengertian ini hampir sama dengan pengertian efektifitas yang telah di kemukakan sebelumnya. Efektifitas merupakan ukuran dari pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan yang dilakukan dapat di katakan efektif, kurang efektif, sedang-sedang, sangat kurang, sampai tidak efektif.

Sedangkan menurut I Nyoman Sumardi (2005:105) efektifitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Pada dasarnya efektifitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi yang di tetapkan. Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang di lakukan, sejauh mana seorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang di harapkan.

Efektifitas merupakan suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Bila seseorang

melakukan sesuatu dengan maksud tertentu dengan tujuan tertentu yang memang kehendaknya maka perbuatan orang tersebut di katakan efektif jika menimbulkan efek atau mencapai tujuan sebagai mana yang di kehendaki.

Handayani, Suwarno (1990:16) juga mengungkapkan pengertian efektifitas. Menurut beliau efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran/tujuan yang telah di tentukan sebelumnya. Jelasnya, bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang di rencanakan sebelumnya adalah efektif. Jadi jika tujuan/sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah di tentukan maka pekerjaan itu tidak efektif.

Efektivitas dapat di definisikan dengan empat hal yang menggambarkan tentang efektifitas, yaitu :

1. Mengerjakan hal-hal yang benar, dimana sesuai dengan yang seharusnya di selesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya.
2. Mencapai tingkat diatas pesaing, dimana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.
3. Membawa hasil, dimana apa yang telah di kerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat.
4. Menangani tantangan masa depan

Efektifitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektifitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektifitas, dipahami bahwa efektifitas dalam proses suatu program yang tidak dapat mengabaikan target sasaran yang telah ditetapkan agar operasionalisasi untuk mencapai keberhasilan dari program yang dilaksanakan dapat tercapai dengan tetap memperhatikan segi kualitas yang diinginkan oleh program. Pengertian efektifitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan.

Unsur yang penting dalam konsep efektifitas adalah, yang pertama adalah pencapaian tujuan yang sesuai dengan apa yang telah disepakati secara maksimal, tujuan merupakan harapan yang dicita-citakan atau suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai oleh serangkaian proses.

Memperhatikan pendapat tersebut, bahwa konsep efektifitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Kata efektif sering dicampur adukkan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif.

The Liang Gie (2000:24) juga mengemukakan “efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan.”

Sedangkan Septi winarsih, Ratminto (2005:179) mendefinisikan efektifitas “ tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka waktu

panjang maupun misi organisasi. Akan tetapi pencapaian tujuan ini harus juga mengacu pada visi organisasi.

Pandangan yang sama menurut pendapat Peter F. Drucker yang dikutip H.A.S. Moenir (2005:166) dalam bukunya Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia yang mendefinisikan efektifitas, sebagai berikut:

Efektifitas, pada sisi lain menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil yang sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan.

Memperhatikan pendapat tersebut, bahwa konsep efektifitas merupakan suatu konsep yang bersifat *multidimensional*, artinya dalam mendefinisikan efektifitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektifitas adalah pencapaian tujuan. Kata efektif sering di campur adukkan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat diketahui bahwa efektifitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat di katakan bahwa efektifitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan di bandingkan dengan target yang telah di tetapkan sebelumnya.

2.2 Pendekatan Efektifitas

Robbins (1994:54) mengungkapkan juga mengenai pendekatan dalam efektifitas organisasi:

1. Pendekatan pencapaian tujuan (*goal attainment approach*).

Pendekatan ini memandang bahwa keefektifan organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuannya (*ends*) daripada caranya (*means*). Kriteria pendekatan yang populer digunakan adalah memaksimalkan laba, memenangkan persaingan dan lain sebagainya. Metode manajemen yang terkait dengan pendekatan ini dikenal dengan *Manajemen By Objectives (MBO)* yaitu falsafah manajemen yang menilai keefektifan organisasi dan anggotanya dengan cara menilai seberapa jauh mereka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pendekatan sistem.

Pendekatan ini menekankan bahwa untuk meningkatkan kelangsungan hidup organisasi, maka perlu diperhatikan adalah sumber daya manusianya, mempertahankan diri secara internal dan memperbaiki struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi agar dapat berintegrasi dengan lingkungan yang darinya organisasi tersebut memerlukan dukungan terus menerus bagi kelangsungan hidupnya.

3. Pendekatan konstituensi-strategis.

Pendekatan ini menekankan pada pemenuhan tuntutan konstituensi itu di dalam lingkungan yang darinya orang tersebut memerlukan dukungan yang terus

menerus kelangsungan hidupnya.

4. Pendekatan nilai-nilai bersaing.

Pendekatan ini mencoba mempersatukan ke tiga pendekatan diatas, masing-masing di dasarkan atas suatu kelompok nilai. Masing-masing di dasarkan atas suatu kelompok nilai. Masing-masing nilai selanjutnya lebih disukai berdasarkan daur hidup di mana organisasi itu berada.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa pendekatan tujuan di dasarkan pada pandangan organisasi di ciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dalam teori sistem, organisasi dipandang sebagai suatu unsur dari sejumlah unsur yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain.

Sedangkan pendekatan *Multiple Constituency* merupakan pendekatan yang menggabungkan pendekatan tujuan dengan pendekatan sistem sehingga diperoleh satu pendekatan yang lebih tepat bagi tercapainya efektifitas organisasi. Sedangkan untuk pendekatan nilai-nilai bersaing merupakan pendekatan yang menyatukan ketiga pendekatan yang telah dikemukakan diatas yang di sesuaikan dengan nilai suatu kelompok.

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi kebijakan

Di bawah ini penulis menguraikan empat faktor yang mempengaruhi efektifitas, yang di kemukakan oleh Van Mater dan Van Horn (1997:78). Van Mater dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat

kebijaksanaan yang akan di laksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja .

Model implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh Van Mater dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi kebijakan di pengaruhi oleh beberapa variabel yang saling terkait, di antaranya adalah :

1. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan sangat di pengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Hal ini terkait dengan konteks kebijakan yang akan di laksanakan pada beberapa kebijakan di tuntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain di perlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

2. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dan kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

3. Sikap Para Pelaksana

Merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektifitas kebijakan . Didalam diri setiap individu akan di temukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu oganisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangan terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan lebih dahulu mengenai persepsi dari pelaksana dalam batas mana kebijakan itu di laksanakan.

Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan. Kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan di antara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Pada ahirnya, intensitas disposisi para pelaksana dapat mempengaruhi pelaksana kebijakan. Kurangnya atau

terbatasnya intensitas disposisi ini akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

4. Komunikasi Antar Organisasi Terkait Dan Kegiatan-kegiatan Pelaksana

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif menurut Van Meter dan Van Horn yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu. Yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus di komunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan ini para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang di harapkan darinya dan tahu apa yang harus di lakukan. Dalam suatu organisasi publik, proses pentransferan berita ke bawah di dalam organisasi dari suatu organisasi ke organisasi lain dan ke komunikator lain sering mengalami gangguan baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama terhadap suatu standar dan tujuan atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan , maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kebijakan yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten. Di samping itu koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian pula sebaliknya.

5. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang di isyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

6. Standar Dan Sasaran Kebijakan/Ukuran Dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang realistis dengan sosio kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal, maka akan sulit di realisasikan. Van Mater dan Van Horn mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada

dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapainya standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan merupakan masalah yang penting. Implementator mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, di karenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

Menurut pendapat di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam sebuah kebijakan terdiri atas berbagai unsur yang saling berkaitan, jika salah satu unsur memiliki kinerja yang buruk, maka akan mempengaruhi implementasi kebijakan secara keseluruhan;
2. Keefektifan membutuhkan kesadaran dan interaksi yang baik dengan lingkungan;
3. Kelangsungan hidup dari sebuah kebijakan membutuhkan kesiapan sumber daya yang terlibat di dalamnya.

Suatu kebijakan tidak memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas organisasi, akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuannya tetapi apabila suatu kebijakan memperhatikan faktor-faktor tersebut maka tujuan yang

ingin dicapai dapat lebih mudah tercapai hal itu dikarenakan efektifitas akan selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.

2.4 Kriteria Pengukuran Efektifitas

Keluaran (*output*) yang di hasilkan lebih banyak bersifat keluaran (*output*) tidak berwujud (*intangible*) yang tidak mudah untuk di kuantifikasi, maka pengukuran efektifitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektifitas tersebut karena pencapaian hasil (*outcome*) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran efektifitas biasanya dinyatakan secara kualitatif (berdasarkan pada mutu) dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*), artinya apabila mutu yang dihasilkan baik, maka efektifitasnya baik pula.

Tercapainya tingkat efektifitas yang tinggi perlu memperhatikan kriteri-kriteri efektifitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard M. Steers (1985:46) sebagai berikut:

1. Produktivitas.
2. Kemampuan ber laba.
3. Kesejahteraan pegawai

Secara lebih operasional, Emitai Atzoni yang dikutip oleh Indrawijaya (1989:227) mengemukakan “efektifitas organisasi akan tercapai apabila organisasi tersebut memenuhi kriteria mampu beradaptasi, berintegrasi, memiliki motivasi, dan melaksanakan produksi dengan baik”.

Stephen P. Robbins (1994 : 55) mengungkapkan kriteria efektifitas organisasi sebagai berikut:

Tabel 2.2 : Kriteria Efektifitas Organisasi

NO	KRITERIA	NO	KRITERIA
1.	Keefektivan keseluruhan	16	Kontrol
2.	Produktifitas	17	Internalisasi tujuan organisasi
3.	Efisiensi	18.	Konsensus tentang tujuan
4.	Laba	19.	Keterampilan interpersonal manajer
5.	Kualitas		Keterampilan manajer
6.	Kecelakaan	20.	Manajemen informasi dan komunikasi
7.	Pertumbuhan	21.	Kesiapan
8.	Kemangkiran	22.	Pemanfaatan lingkungan
9.	Pergantian pegawai	23.	Evaluasi pihak luar
10.	Motivasi	24.	Stabilitas
11.	Kepuasan kerja	25.	Nilai sumber daya manusia
12.	Moral/semangat kerja	26.	Perencanaan dan pencapaian tujuan
13.	Konflik/ solidaritas	27.	Penekanan pada performa
14.	konsensus		
15.	fleksibilitas/ penyesuaian	28.	Penekanan pada pelatihan dan pengembangan

		29.	Partisipasi dan pengaruh yang di gunakan bersama
		30.	

Sumber : Stephen P. Robbin (1994:55)30

Membahas masalah ukuran efektifitas memang sangat bervariasi tergantung dari sudut terpenuhinya beberapa kriteria akhir. Menurut pendapat Cambell yang dikutip oleh Richard M. Steers (1985:46-48) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” menyebutkan beberapa ukuran dari pada efektifitas, yaitu:

1. Kualitas artinya kualitas yang di hasilkan oleh organisasi;
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang di hasilkan;
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik;
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut;
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi;
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya;
7. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu

8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu
9. Semangat Kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki;
10. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan;
11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan;
12. Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan

Sehubungan dengan hal-hal yang di kemukakan diatas, maka ukuran efektifitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukan pada tingkat sejauh mana organisasi, Program/ kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985:53) dalam bukunya “Efektifitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektifitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi

3. Adaptasi

Berdasarkan ukuran efektifitas diatas, maka keterkaitan antara variabel yang mempengaruhi Efektifitas terdapat tujuh indikator yang sangat mempengaruhi terhadap efektifitas. Tujuh indikator tersebut, sangat dibutuhkan dalam menerapkan sistem informasi. Hal tersebut dapat dilihat dari :

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, di perlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu (Duncan, dalam Steers 1985:53) :

- 1) Kurun waktu pencapaiannya ditentukan,
- 2) Sasaran merupakan target yang kongkret
- 3) Dasar hukum

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu (Nazarudin, dalam Claude 1994:13):

- 1) Prosedur
 - 2) Proses sosialisai
3. Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk meyelaraskan suatu individu terhadap perubahan–perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu (Duncan, dalam Steers 1985:53):

- 1) Peningkatan kemampuan
- 2) Sarana dan prasarana

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pengukuran merupakan penilaian dalam arti tercapainya sasaran yang telah di tentukan sebelumnya dengan menggunakan sasaran yang tersedia. Jelasnya bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang di rencanakan sebelumnya adalah efektif. Jadi, apabila suatu tujuan atau sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, maka tidak efektif. Efektifitas merupakan fungsi dari manajemen, dimana dalam sebuah efektivitas di perlukan adanya prosedur, strategi, kebijaksanaan, program dan pedoman. Tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama.

2.5 Penilaian Terhadap Efektifitas

Telah di kemukakan bahwa penilaian prestasi perseorangan merupakan dasar penilaian efektifitas suatu organisasi. Walaupun demikian, seperti telah di kemukakan semuanya itu harus dapat di koordinasikan dengan baik. Hal ini

penting, sebab prestasi seseorang yang di katakanlah baik belum berarti efektif bagi organisasi secara keseluruhan. Untuk menilai apakah suatu organisasi efektif atau tidak, secara keseluruhan di tentukan oleh apakah tujuan organisasi itu tercapai dengan baik atau sebaliknya. Berikut ini akan di kemukakan beberapa aspek penilaian efektifitas organisasi, terutama yang berkaitan dengan model-model yang dapat dipergunakan.

Bila dikaji kembali terhadap perkembangan teori dan ukuran yang dapat di gunakan untuk menilai efektifitas organisasi, sesungguhnya sudah cukup banyak teori dan ukuran yang telah di ketengahkan, mulai teori yang sederhana sampai yang cukup kompleks. Teori yang paling sederhana ialah teori yang berpendapat bahwa efektifitas organisasi sama dengan prestasi organisasi secara keseluruhan. Menurut pandangan ini, efektifitas organisasi dapat diukur berdasarkan seberapa besar keuntungan yang diperolehnya. Dalam hal ini keuntungannya lebih besar, maka berarti organisasi makin efektif. Dari sisi lain, organisasi dapat di katakan efektif, bila jumlah pengeluaran makin lama makin menurun. Dalam perkataan lain, menurut teori efektifitas organisasi ditentukan oleh efisiensinya (Indrawijaya ,1989 : 226).

Pandangan yang juga penting untuk di perhatikan ialah teori yang menghubungkan pengertian efektifitas organisasi dengan tingkat kepuasan para anggotanya. Menurut pandangan teori ini, suatu organisasi di katakan efektif, bila para anggotanya merasa puas. Pandangan ini merupakan kelanjutan pandangan penganut paham hubungan antar manusia, yang menempatkan kepuasan anggota sebagai inti persoalan organisasi dan manajemen.

Akhir-akhir ini perkembangan suatu teori atau pandangan yang lebih komprehensif, dalam arti membahas persoalan efektivitas organisasi berdasarkan berbagai macam ukuran. Pandangan ini berpendapat, bahwa susunan organisasi memang merupakan suatu hal yang penting, tetapi dalam susunan tersebut perlu diberi kebebasan bertindak. Adanya kebebasan bertindak ini sangat penting untuk memungkinkan para anggota dan organisasi secara keseluruhan dapat lebih menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan, hasil penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa antara tahun 1957 dan 1975, kriteria “*adaptability – flexibility – productivity and satisfaction*” paling umum di penggunaan. Akibat dari penemuan tersebut, pengertian efektivitas sedikit mengalami pergeseran, yaitu selain berkaitan dengan aspek intern organisasi, juga berhubungan dengan aspek luar organisasi, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan keadaan sekeliling.

Selanjutnya, baik aspek intern organisasi (efisiensi) maupun perubahan tersebut haruslah berkaitan dengan dinamika hubungan antar personal suatu sistem secara keseluruhan. Emitai Etzioni, dalam Perilaku Organisasi (Indrawijaja, 1989 : 227), mengemukakan pendekatan pengukuran efektivitas organisasi yang disebut *Sistem Model* dan *Produksi*. Pada kriteria adaptasi di persoalan kemampuannya, untuk itu antara lain di penggunaan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja, serta ruang lingkup kegiatan organisasi tersebut. Hal terakhir ini mempertanyakan seberapa jauh kemanfaatan organisasi tersebut bagi lingkungannya. Kriteria berikutnya adalah integritas, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan

sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.

Kriteria ketiga adalah motivasi anggota, dalam kriteria ini dilakukan pengukuran mengenai keterikatan dan hubungan antara pelaku organisasi dengan organisasinya dan kelengkapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Kriteria keempat adalah produksi, yaitu usaha pengukuran efektifitas organisasi di hubungkan dengan jumlah dan mutu keluaran organisasi, serta intensitas kegiatan suatu organisasi.

Melihat organisasi sebagai sistem, maka membahas efektifitas organisasi secara lebih komprehensif menjadi lebih mungkin. Memang dalam kenyataan sangatlah sulit atau mempersamakan efektifitas organisasi dengan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan. Hal ini disebabkan, selain karena selalu ada penyesuaian dalam target yang akan dicapai, juga dalam proses pencapaiannya seringkali ada tekanan dari sekelilingnya. Kenyataan selanjutnya menyebabkan bahwa jarang sekali target dapat tercapai secara keseluruhan.

Pandangan yang lebih meyakinkan sebagai hasil penelitian, dikemukakan oleh George Poulus dan Tannenbaum dalam Perilaku Organisasi (Indrawijaya,1989 :228), sebagai berikut :

“Suatu pendekatan yang dapat lebih di pertanggungjawabkan, sebagaimana yang diajukan oleh para peneliti adalah suatu cara pengukuran efektifitas yang mempergunakan beberapa unsur yang biasa terdapat dalam kehidupan organisasi

yang berhasil. Hasil studi menunjukkan adanya penggunaan tiga unsur, yaitu : produktifitas (efisiensi dalam arti ekonomi), tekanan stress(dibuktikan dengan tingkat ketegangan dan konflik), dan fleksibilitas (atau kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan intern dan ekstern)”.

Dalam rangka ini pula, Steers dalam Perilaku Organisasi (Indrawijaya ,1989 : 228) mengembangkan model suatu proses untuk menilai efektifitas organisasi, yang mencakup tiga sudut pandang, yakni : pertama, optimal tujuan yang akan dicapai yaitu bila beberapa bagian dari tujuan itu mendapat perhatian alokasi sumber dana dan daya yang lebih besar ; kedua, ialah yang berkaitan dengan interaksi antara organisasi dengan keadaan sekeliling; ketiga, yaitu penekanan pada aspek perilaku yang lebih memusatkan perhatian pada pentingnya peranan perilaku manusia dalam proses pencapaian tujuan organisasi dalam efektifitas suatu organisasi. Berdasarkan pembahasan mengenai perkembangan teori, pandangan, dan konsepsi penilaian efektifitas organisasi tersebut di atas, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

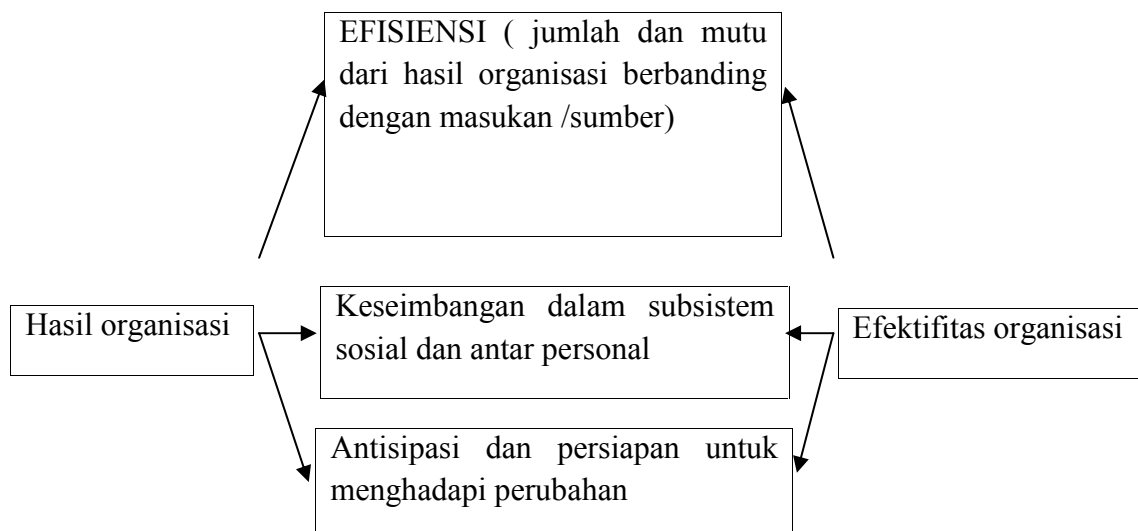
1. Menentukan efektifitas organisasi hanya menurut tingkat prestasi suatu organisasi adalah suatu pandangan yang terlalu menyederhanakan hakekat penilaian efektifitas organisasi. Diketahui bahwa setiap organisasi mempunyai beberapa sasaran dan diantaranya sering terdapat persaingan. Persoalannya ialah bagaimana caranya mengembangkan suatu rangkaian atau kumpulan sasaran yang dapat dicapai dengan batasan sarana, sumberdaya, dan dana yang tersedia.
2. Tidak semua kriteria sekaligus dapat di gunakan untuk mengukur efektifitas organisasi. Keinginan untuk meningkatkan keuntungan

umpamanya, dapat menyebabkan seseorang terlalu optimis dalam hal potensi pemasaran. Ini sering menyebabkan timbulnya efek samping, yaitu kurangnya perhatian terhadap usaha mempertahankan kelangsungan hidup organisasi.

3. Pengukuran efektifitas organisasi sesungguhnya harus mencakup berbagai kriteria, seperti : efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan adaptasi, integrasi, motivasi, produksi, dan sebagainya. Cara pengukuran ini sering disebut “*Multiple Factor Model*” penilaian efektifitas organisasi.

Teknik penilaian efektifitas organisasi haruslah mencerminkan adanya interaksi dari “*the formal task – oriented objectives of the organization, the interpersonal-humanistic social goals of the people who work in the organization, and the environmental changes that are taking place constantly and may influence the other elements because their relationship to survival*”. Untuk menjelaskan pendapat tersebut, Duncan dalam Perilaku Organisasi (Indrawiyaja :1982:230), menggambarkan beberapa unsur penting efektifitas organisasi, sebagai berikut:

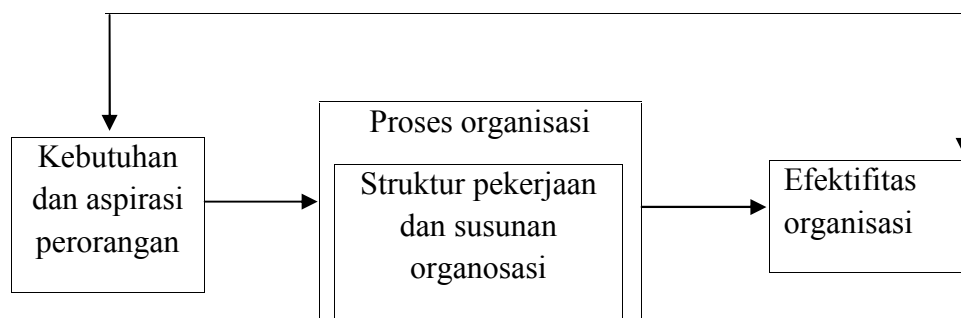
Gambar 2.2 : Unsur-unsur Efektifitas



**Sumber : W. Jack, Duncan, Organizational Behavior, Houghton Mifflin,
Boston, Edisi ke 2, 1981, hal : 370.**

Berdasarkan gambar di atas, kemudian Duncan menyusun model efektifitas organisasi, seperti gambar berikut ini :

Gambar 2.3 : Model Efektifitas Organisasi



**Sumber : W. Jack, Duncan, Organizational Behavior, Houghton Mifflin,
Boston, Edisi ke 2, 1981, hal : 371**

Setiap orang memasuki suatu organisasi, karena ia berkeyakinan kebutuhan dan harapannya dapat terpenuhi. Faktor lingkungan, selain dapat merupakan unsur pendorong terhadap kebutuhan dan harapan seseorang, juga dapat merupakan faktor yang mempengaruhi organisasi secara keseluruhan. Seseorang boleh saja mempunyai harapan yang cukup tinggi, semisal selama ini ia adalah orang yang berhasil, mungkin pula ia butuh akan keberhasilan dalam

pekerjaannya, karena keberhasilan dianggap penting dalam lingkungannya. Seberapa jauh seseorang dapat memenuhi kebutuhan dan harapannya, sangat tergantung kepada bagaimana suatu pekerjaan dirancang dan bagaimana suatu proses terjadi dalam organisasi. Hal ini di kemukakan oleh Hackman dan Lawler, sebagaimana dikutip oleh Duncan dalam Perilaku Organisasi (Indrawijaya, 1989 : 231), sebagai berikut :

Para pendukung dari *job enrichment* berpendapat, bahwa kepuasan akan kebutuhan dan *selfactualization* akan lebih mungkin tercapai bila orang-orang tersebut dapat melaksanakan unsur-unsur hakiki dari suatu pekerjaan dan dapat mengendalikan pekerjaan tersebut. Perencanaan tugas dan pekerjaan merupakan bagian dari proses penyusunan organisasi secara keseluruhan. Dalam organisasi birokrat, perencanaan tugas dan pekerjaan dilakukan atas dasar prinsip rasionalitas dan reabilitas yang tinggi, disertai standarisasi dan spesialisasi, memang tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip tadi memang dapat menimbulkan efisiensi. Tetapi pelaksanaannya secara ketat dapat menimbulkan terjadinya kelambatan komunikasi dan informasi, keengganan untuk berubah, atau menonjolnya bidang pekerjaan tertentu. Kemungkinan terakhir ini sering terjadi bila beberapa unit lebih mementingkan prestasi unit masing-masing dan kurang memperhatikan prestasi organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya faktor lingkungan juga mempengaruhi efektifitas organisasi, begitu pula keadaan politik, perkembangan keadaan ekonomi, sistem nilai masyarakat terhadap prestasi seseorang dan prestasi organisasi. Dari berbagai uraian diatas, maka dapat ditarik

suatu gambaran secara garis besar bahwa efektifitas pelaksanaan tugas dapat dilihat dari dua dimensi, yakni :

1. Dimensi produktifitas yang meliputi penyelesaian pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dan ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan/tugas.
2. Dimensi kepuasan kerja, yang meliputi perolehan tambahan penghasilan dan penghargaan, serta pemecahan permasalahan pekerjaan dan bantuan yang di berikan oleh teman sejawat di organisasi.

2.6 Sistem Pendistribusian

Distribusi merupakan kegiatan yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Berkat distribusi barang dan jasa sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian kegunaan barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat di konsumsi (www.dikmenu.go.id di akses pada tanggal 11 April 2012)

Yang termasuk dalam fungsi distribusi :

1. Distribusi pokok, adalah tugas-tugas yang mau tidak mau harus di lakukan:
 - a. Pengangkutan
 - b. Penjualan
 - c. Pembelian
 - d. Penyimpanan

- e. Pembakuan standar kualitas barang
 - f. Penanggungan resiko
2. Fungsi tambahan, yaitu di berlakukan pada distribusi barang-barang tertentu :
- a. Menyeleksi
 - b. Mengepak/mengemas
 - c. Memberi informasi

Sedangkan pengertian sistem pendistribusian adalah pengaturan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen .

Proses distribusi pada dasarnya menciptakan faedah (*utility*) waktu, tempat dan pengalihan hak milik. Dalam menciptakan faedah tersebut terdapat 2 aspek di dalamnya yaitu :

- 1. Lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi (*chanel of distribution/marketing channel*)
- 2. Aktifitas yang menyalurkan arus fisik barang (*physical distribution*)

Menurut Philip Kotler (1998 : 174) agar suatu kegiatan penyaluran barang dapat berjalan dengan baik (efektif dan efisien) maka pemakai saluran pemasaran harus mampu melakukan sejumlah tugas penting yaitu :

- a. Penelitian
- b. Promosi
- c. Control
- d. Penyelarasan
- e. Negosiasi
- f. Distribusi fisik

- g. Pembiayaan
- h. Pengambilan resiko

Pengukuran efektifitas saluran distribusi diukur melalui sejumlah indikator-indikator pengukuran (El-Ansary dan Cooper dalam Bowersoxet.,al.,1992)sebagai berikut :

1. Kecukupan jumlah, tingkat kecukupan jumlah unit yang ingin dicapai dalam kuantitas dan kualitas yang di perlukan.
2. Waktu pengiriman, ketepatan serta kecepatan dan kemudahan dalam mendapatkan barang yang di perlukan
3. Kelengkapan item produk yang dibutuhkan oleh anggota saluran

2.7 Indikator Kemiskinan

Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standart kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi social, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset (P2KP, Pedoman Umum, 2004:1).

Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002:3).

Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. Secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (SMERU dalam Suharto dkk, 2004).

Ada dua pendekatan seseorang tergolong sebagai orang miskin. *Pertama*, pendekatan absolut yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan fisik manusia. Tolok ukur yang dipakai adalah kebutuhan keluarga, dengan memperhatikan kebutuhan minimal yang harus dipenuhi oleh suatu keluarga agar dapat melangsungkan kehidupannya secara sederhana, tetapi memadai sebagai warga masyarakat yang layak. Termasuk didalamnya kebutuhan akan pangan, perumahan, sandang, pemeliharaan kesehatan dan pendidikan anak. Menurut pendekatan ini kemiskinan dipahami sebagai suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencapai kebutuhan fisik pada tingkat minimal dari standar kebutuhan yang sudah ditetapkan (<http://khairilanwarsemsi.blogspot.com/2011/12/indikator-kemiskinan.html> diakses pada tanggal 23 Januari 2013)

Kedua adalah pendekatan relatif yang mendefinisikan kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan seseorang di dalam masyarakat. Tolok ukur yang dipakai adalah tingkat pendapatan kepala keluarga per bulan atau per tahun. Berdasarkan tolok ukur ini seseorang yang tergolong miskin ditentukan berdasarkan kedudukan relatifnya dalam masyarakat dengan memperhatikan

sejauhmana mutu kehidupannya berbeda dibandingkan dengan rata-rata mutu kehidupan yang berlaku secara keseluruhan. Menurut pendekatan relatif, kemiskinan sekelompok orang dalam masyarakat yang hidup dalam keadaan melarat, terhina, dan tidak layak disebabkan tidak meratanya pembagian pendapatan di dalam masyarakat.

Kemiskinan dapat juga ditentukan dengan cara membandingkan tingkat pendapatan individu atau keluarga dengan pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar minimum. Dengan demikian, tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin. Konsep kemiskinan seperti ini dikenal sebagai konsep kemiskinan absolut. Pada kondisi lain bila tingkat pendapatan sudah mencapai tingkat pemenuhan kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan pendapatan masyarakat di sekitarnya. Dalam pengertian masih berada dalam keadaan miskin bila dibandingkan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya. Konsep kemiskinan seperti ini dikenal sebagai kemiskinan relatif .

Dengan demikian, sekurang-kurangnya ada dua pendekatan yang digunakan untuk pemahaman tentang kemiskinan, yaitu pendekatan absolut dan pendekatan relatif. Pendekatan pertama adalah perspektif yang melihat kemiskinan secara absolut yaitu berdasarkan garis absolut yang biasanya disebut dengan garis kemiskinan. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan relatif, yaitu melihat kemiskinan itu berdasarkan lingkungan dan kondisi sosial masyarakat.

Pendekatan yang sering digunakan oleh para ahli ekonomi adalah pendekatan dari segi garis kemiskinan (*poverty line*). Garis kemiskinan diartikan sebagai batas kebutuhan minimum yang diperlukan seseorang atau rumah tangga untuk dapat hidup dengan layak. Akan tetapi, diantara para ekonom terdapat perbedaan dalam menetapkan tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan garis kemiskinan tersebut.

Berdasarkan definisi kemiskinan dan fakir miskin dari BPS dan Depsos (2002), jumlah penduduk miskin pada tahun 2002 mencapai 35,7 juta jiwa dan 15,6 juta jiwa (43%) diantaranya masuk kategori fakir miskin. Secara keseluruhan, prosentase penduduk miskin dan fakir miskin terhadap total penduduk Indonesia adalah sekira 17,6 persen dan 7,7 persen. Ini berarti bahwa secara rata-rata jika ada 100 orang Indonesia berkumpul, sebanyak 18 orang diantaranya adalah orang miskin, yang terdiri dari 10 orang bukan fakir miskin dan 8 orang fakirmiskin(Suharto,2004:3).

Adapun Klasifikasi Masyarakat Miskin yaitu:

1. Penggolongan kemiskinan didasarkan pada suatu standar tertentu yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Berdasarkan criteria ini maka dikenal kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum, sedangkan komunitas yang termasuk dalam kemiskinan relatif adalah mereka yang memiliki

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum tetapi secara relatif mereka masih di bawah rata-rata pendapatan masyarakat yang ada di sekitarnya.

2. Sedangkan diskursus lain mencoba mengetengahkan pembahasan kemiskinan yang dibedakan menjadi natural, kultural dan struktural. Kemiskinan natural sama pengertiannya dengan kemiskinan turun temurun, disebabkan oleh suatu kondisi keterbatasan secara alamiah yang dihadapi suatu komunitas sehingga sulit melakukan perubahan. Kemiskinan kultural adalah suatu kondisi miskin yang dihadapi komunitas, disebabkan oleh faktor budaya. Budaya yang hidup, diyakini dan dikembangkan dalam suatu masyarakat menyebabkan proses pelestarian kemiskinan dalam masyarakat itu sendiri.
3. Kemiskinan struktural merupakan suatu kemiskinan yang melanda suatu komunitas yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang dibangun manusia. Faktor-faktor tersebut muncul karena dibangun dan dikondisikan oleh manusia, sehingga menyebabkan kerugian pada suatu sisi (<http://dr-suparyanto.blogspot.com/2011/02/masyarakat-miskin.html> di akses pada tanggal 23 januari 2013).

Indikator kemiskinan pada satu rumah tangga yang ditentukan Badan pusat Statistik adalah :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang;

2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester;
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain;
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/ air hujan;
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/ minyak tanah;
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu;
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari;
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik;
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah)
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD;
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

Menurut SMERU (2001), kemiskinan memiliki berbagai dimensi:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal.
5. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam.
6. Tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak telantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

Di tiap daerah memiliki ukuran tingkat kemiskinan tersendiri. Begitu juga di kelurahan Sorek Satu, kelurga miskin di kelurahan Sorek Satu akan berbeda dengan keluarga miskin di kota Jakarta. Dari hasil wawancara dengan Kasi Ketertiban dan Ketentraman Kelurahan Sorek Satu, Bapak Asril mengatakan adapun kriteria penerima Raskin di kelurahan Sorek Satu adalah sebagai berikut :

1. Kepala kelurga tidak memilik penghasilan yang tetap tiap bulannya

2. Penghasilan yang didapat kepala keluarga antara Rp.800.000-Rp.950.000/bulan
3. Di prioritaskan bagi janda yang telah renta dan tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
4. Tidak memiliki rumah sendiri atau Dinding rumah terbuat dari papan
5. Tidak memiliki tabungan maupun investasi yang bisa di andalkan untuk masa depan

3) Program Raskin

Raskin digulirkan sejak 1 Juli 1998 dengan nama Operasi pasar Khusus (OPK) dan berganti nama menjadi Raskin sejak tahun 2002, sebagai bagian dari program jaringan pangan sosial (JPS), program ini di gulirkan bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga miskin sekaligus di maksudkan guna menanggulangi kemiskinan. Sebab, secara filosofis ketika kebutuhan pangan sudah terpenuhi maka masyarakat dapat mengalihkan pengeluaran pada kebutuhan selain bahan pangan.

Beras miskin (Raskin) pada dasarnya adalah beras murah yaitu yang harga jualnya kepada masyarakat telah disubsidi oleh pemerintah, yang di berikan kepada keluarga prasejahtera dan sejahtera satu. Penetapan jumlah keluarga miskin yang berhak menerima Raskin adalah sesuai dengan ketentuan pemerintah dalam hal ini Menko Kesra yaitu berdasarkan data dari BPS. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah agar dalam memberikan subsidi dan mengupayakan bantuan, dapat di salurkan tepat mencapai sasaran.

Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan Program Raskin (Pedoman Umum Raskin Tahun 2011) yang di terbitkan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat) :

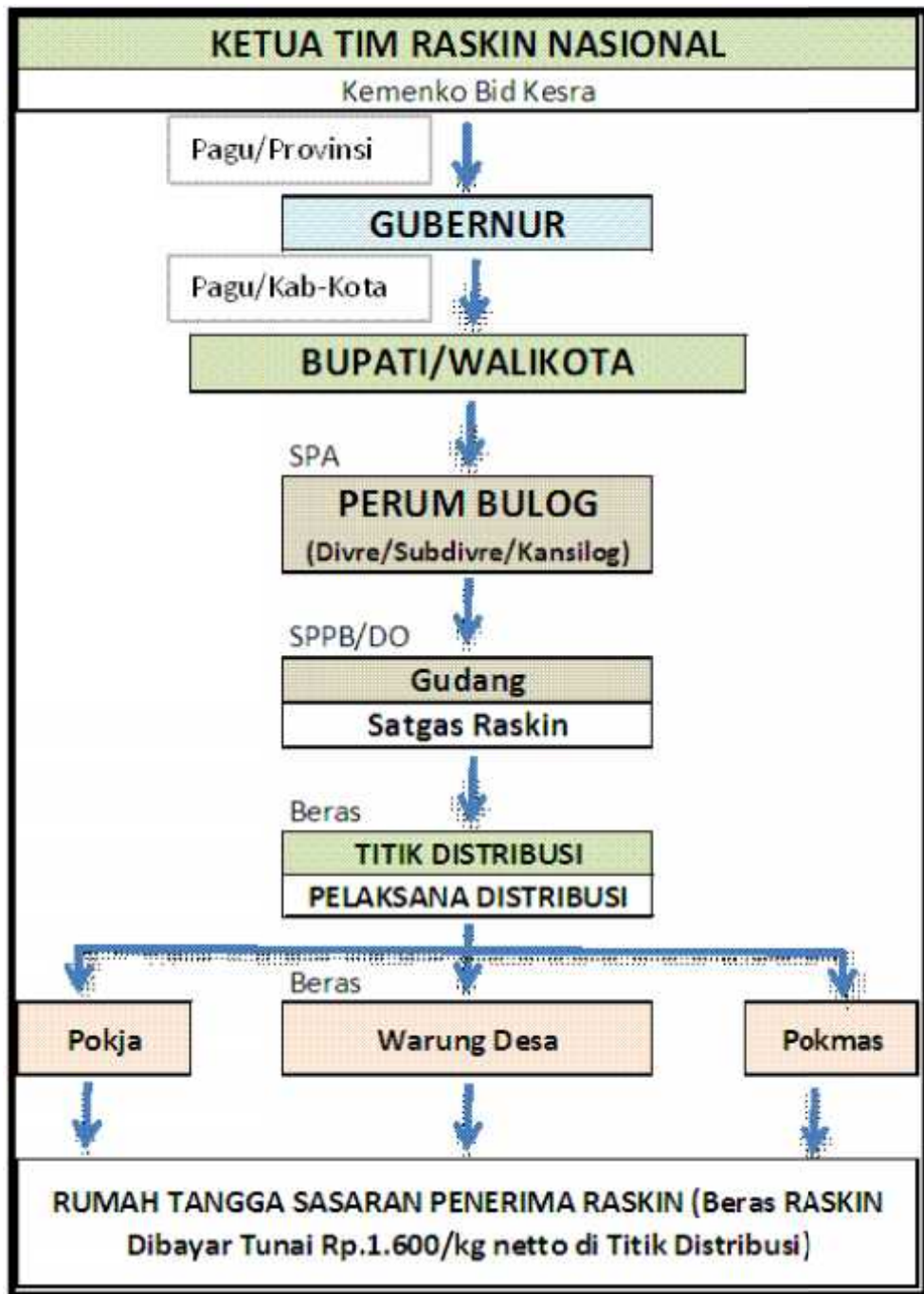
1. UU No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat
2. UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan
3. UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN
4. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. UU No.10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011
6. UUN No. 18 Tahun 1986 tentang Undang-undang No.18 Tahun 1985
7. UU No.68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan
8. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2003 tentang pendirian Perum Bulog
9. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota
11. Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
12. Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2011
13. Inpres Kebijakan Pengadaan dan Penyaluran gabah/beras oleh pemerintah

14. Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

15. Kepmenko Kesra No. 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat

Pada tahun 2007, Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) menjadi koordinator pelaksanaan Raskin untuk pendistribusian beras. Badan urusan logistik (Bulog) bertanggung jawab mendistribusikan beras hingga titik distribusi dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyalurkan beras dari titik distribusi kepada RTM

Gambar 2.4 Alur Distribusi Raskin



Sumber : http://www.bulog.co.id/alurraskin_v2.php di akses pada tanggal 20 April 2012

Penyaluran Raskin berawal dari surat permintaan alokasi (SPA) dari pemerintah kabupaten/kota kepada perum Bulog dalam hal ini kepada kadivreg/kasubdivreg/kansilog perum Bulog berdasarkan pagu Raskin (Tonase dan

jumlah rumah tangga miskin sasaran – RTM) dan rincian masing-masing kecamatan dan desa/kelurahan.

Pada waktu beras akan di distribusikan ke titik distribusi perum Bulog berdasarkan SPA menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order (SPPB/DO) beras masing-masing kelurahan atau desa kepada Satker Raskin. Satker Raskin mengambil beras Raskin ke gudang. Bulog mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada pelaksana Raskin di titik distribusi. Di titik distribusi, penyerahan/penjualan beras kepada RTM-PM (Penerima Manfaat) Raskin dilakukan oleh salah satu dari 3 pelaksana distribusi Raskin yaitu : kelompok kerja (POKJA), atau warung desa (WARDES), atau kelompok masyarakat (POKMAS). Di titik distribusi inilah terjadi transaksi secara tunai dari RTM-PM Raskin ke pelaksana distribusi.

2.9 Tujuan Raskin

Tujuan program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Sasaran program Raskin tahun 2011 adalah berkurangnya beban pengeluaran 17.488.007 RTS berdasarkan data PPLS-08 BPS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180 kg/RTS/tahun atau setara dengan 15 kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp. 1600/kg netto di titik distribusi.

2.10 Prinsip Pengelolaan

Prinsip pengelolaan Raskin adalah suatu nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Raskin. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan Raskin. Keberpihakan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM), yang maknanya mendorong RTM untuk ikut berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian seluruh kegiatan Raskin baik di desa dan kecamatan, termasuk menerima manfaat atau menikmati hasilnya. Transparansi, yang maknanya membuka akses informasi kepada lintas pelaku Raskin terutama masyarakat penerima Raskin, yang harus tahu, memahami dan mengerti Pengorganisasian Dalam rangka pelaksanaan program Raskin dipandang perlu mengatur organisasi pelaksana program Raskin. Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya, dibentuk Tim Koordinasi Raskin di tingkat pusat sampai kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat desa/kelurahan serta tim lainnya sesuai kebutuhan yang diatur dan ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang.

Penanggung jawab pelaksanaan program Raskin di pusat adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, di provinsi adalah gubernur, di kabupaten/kota adalah bupati/walikota, di kecamatan adalah camat dan di desa/kelurahan adalah kepala desa/lurah.

a. Tim Koordinasi Raskin Pusat

Tim Koordinasi Raskin Pusat beranggotakan unsur dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Perum BULOG.

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Pusat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

2) Tugas

Melaksanakan koordinasi kebijakan perencanaan dan anggaran, pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan program Raskin.

3) Fungsi

Mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan Raskin sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kemiskinan.

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Pusat

Tim Koordinasi Raskin Pusat terdiri dari Pengarah, Pelaksana dan Sekretariat. Pengarah terdiri dari Ketua dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Anggota terdiri dari unsur Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Sosial, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, BPS, BPKP dan Perum Bulog.

Pelaksana terdiri dari ketua, wakil ketua/ketua bidang dan Anggota. Ketua Pelaksana adalah Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Wakil Ketua I /Bidang Kebijakan Perencanaan adalah Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas; Wakil Ketua II /Bidang Kebijakan Anggaran adalah Direktur Anggaran III, Ditjen Anggaran Departemen Keuangan; Wakil Ketua III /Bidang Pelaksanaan dan Distribusi adalah Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog; Wakil Ketua IV /Bidang Fasilitasi, Monev dan Pengaduan adalah Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat Ditjen PMD Departemen Dalam Negeri.

Anggota Tim terdiri dari unsur-unsur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Pertanian, Badan Pusat Statistik, BPKP, dan Perusahaan Umum Bulog.

b. Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di wilayahnya dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin Tingkat Provinsi sebagai berikut :

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Provinsi adalah pelaksana program Raskin di provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur.

2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan program Raskin.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai fungsi :

- a) Koordinasi perencanaan program Raskin di provinsi.
- b) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Program Raskin.
- c) Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi program Raskin.
- d) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.

- e) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di kabupaten/kota.

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Tim Koordinasi Raskin Provinsi terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, pelaksanaan distribusi, monev dan pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Tim Koordinasi Raskin Provinsi beranggotakan unsur-unsur instansi terkait di tingkat provinsi antara lain Setda (Sekertaris Daerah), Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah), badan/dinas/lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, badan/dinas/kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Perwakilan BPKP dan Divisi Regional/Sub Divisi Regional Perum Bulog serta lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

c. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab program Raskin di tingkat kabupaten/kota bertanggung jawab atas pengalokasian Pagu Raskin bagi seluruh RTS-PM Raskin, penyediaan dan pendistribusian beras, penyelesaian pembayaran HPB (Hasil Penjualan beras) dan administrasi distribusi Raskin di wilayahnya. Untuk penyelenggaraan program Raskin di wilayahnya, bupati/walikota membentuk Tim Koordinasi Raskin sebagai berikut :

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota adalah pelaksana program Raskin di kabupaten/kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan program Raskin.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan program Raskin di kabupaten/kota.
- b) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin di kabupaten/kota.
- c) Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi program Raskin di kabupaten/kota.
- d) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin

Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan.

e) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di kecamatan, desa/kelurahan.

f) Penyelesaian HPB dan administrasi pelaksanaan Raskin.

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: Perencanaan, Pelaksanaan Distribusi, Monev dan Pengaduan Masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota terdiri dari unsur-unsur instansi terkait ditingkat kabupaten/kota antara lain Setda, Bappeda, badan/dinas/lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, badan/dinas/kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Divre/Subdivre /Kansilog Perum Bulog dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

d. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat sebagai penanggung jawab di tingkat kecamatan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin, penyelesaian pembayaran HPB dan administrasi distribusi Raskin di wilayahnya. Untuk penyelenggaraan program Raskin di wilayahnya, camat membentuk Tim koordinasi Raskin sebagai berikut :

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana program Raskin di kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.

2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program Raskin serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan distribusi program Raskin di kecamatan.
- b) Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi program Raskin di kecamatan.
- c) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana Distribusi Desa/Kelurahan.
- d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di desa/kelurahan.

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggung jawab yaitu camat, ketua yaitu sekretaris kecamatan, sekretaris yaitu Kasi Kesejahteraan Sosial, dan anggota terdiri dari aparat Kecamatan, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), anggota Satker Raskin dan pihak terkait yang dipandang perlu.

e. Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan

Kepala desa/lurah sebagai penanggung jawab di tingkat desa/kelurahan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin, penyelesaian pembayaran HPB dan administrasi distribusi Raskin di wilayahnya. Untuk pelaksanaan distribusi Raskin di wilayahnya, kepala desa/lurah dapat memilih dan menetapkan salah satu dari 3 alternatif Pelaksana Distribusi Raskin yaitu :

- 1) Kelompok Kerja (Pokja)
- 2) Warung Desa (Wardes)
- 3) Kelompok Masyarakat (Pokmas)

Pembentukan Pokmas dan Warung Desa diatur dalam Pedoman Teknis tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedum Raskin.

a) Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa/lurah.

b) Tugas

- (1) Menerima dan mendistribusikan beras Raskin dari Satker Raskin dan

menyerahkan/menjual kepada RTS-PM Raskin di Titik Distribusi (TD).

(2) Menerima Hasil Penjualan Beras (HPB) dari RTS-PM Raskin secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Subdivre/Kansilog Perum Bulog atau menyetor secara tunai kepada Satker Raskin.

(3) Menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Penjualan Beras sesuai model DPM-2.

c) Fungsi

(1) Pendistribusian Raskin kepada RTS-PM Raskin.

(2) Penerimaan uang hasil penjualan beras Raskin secara tunai dari RTS-PM Raskin dan penyetorannya kepada Satker Raskin atau ke rekening bank yang ditetapkan Divre/Subdivre/Kansilog Perum Bulog.

(3) Pengadministrasian distribusi Raskin kepada RTS-PM Raskin.

f. Satker Raskin

1) Kedudukan

Satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya.

2) Organisasi

Satker Raskin terdiri dari :

a) Ketua

b) Anggota :

(1) Pegawai Perum Bulog yang ditetapkan melalui Surat Perintah (SP)

Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog Perum Bulog.

(2) Tenaga bantuan yang ditetapkan oleh ketua satker atas sepengetahuan

Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog Perum Bulog.

3) Tugas dan Kewenangan

Satker Raskin mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab :

a) Ketua :

(1) Mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan tenaga bantuan di wilayah kerjanya atas sepengetahuan Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog Perum Bulog.

(2) Mempunyai tugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi, penyelesaian HPB, dan administrasi Raskin.

b) Anggota mempunyai tugas membantu dan bersama ketua sebagai berikut :

- (1) Mendistribusikan beras dari gudang Perum Bulog sampai dengan TD dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi Raskin di TD.
- (2) Menerima uang HPB atau bukti setor bank dari Pelaksana Distribusi Raskin dan menyetorkan ke rekening HPB Bulog.
- (3) Menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery Order (DO), BAST, Rekap BAST di kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HPB (Tanda Terima/kuitansi dan Bukti Setor Bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD.
- (4) Melaporkan pelaksanaan tugas antara lain : realisasi jumlah distribusi berassetoran HPB dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kadivreg/Kasubdivreg/ Kakansilog Perum Bulog secara periodik setiap bulan.

2.11 Pembiayaan Operasional

Pemerintah Provinsi menyediakan anggaran untuk pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi Raskin dari APBD setempat. Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional dari Titik Distribusi sampai di tangan Rumah Tangga Miskin (Penerima Manfaat Raskin) yang bersumber dari APBD dengan tetap mendorong keterlibatan/partisipasi masyarakat. Disamping itu anggaran Daerah hendaknya di arahkan juga untuk pembinaan UPM, koordinasi, monitoring dan evaluasi Raskin di tingkat Kabupaten/Kota.

Dari Perum Bulog sampai titik distribusi menjadi tanggung jawab Perum Bulog. Sedangkan dari titik distribusi sampai ke RTM menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota menyiapkan anggaran khusus dari APBD untuk mendanai pendistribusian Raskin dari titik distribusi sampai ke RTM. Dalam pedoman umum Raskin tahun 2011 yang tercantum dalam Bab 5, indikator efektifitas pendistribusian Raskin di tunjukkan dengan tercapainya 6 target:

1. Tepat sasaran penerima manfaat : Raskin hanya di berikan kepada RTM-PM hasil Mudes/Muskel yang terdaftar pada DPM-1
2. Tepat jumlah : jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun.
3. Tepat waktu : waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi.
4. Tepat administrasi : terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.
5. Tepat harga : harga tebus Raskin adalah sebesar Rp.1600/kg di titik distribusi.
6. Tepat kualitas : terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras Bulog .

Istilah-istilah yang digunakan dalam petunjuk teknis antara lain adalah:

1. Tim Koordinasi program Raskin tingkat Provinsi adalah tim koordinasi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur dan

terdiri dari unsur pemerintah daerah Provinsi (Biro Sarana Perekonomian, Biro Bina Produksi, BPMD, Bappeda, BPS (Badan Pusat Statistik), BKKBN, Perum Bulog, Divisi Regional, Kepolisian, Kejaksaan serta stakeholders yang terkait.

2. Tim Koordinasi Divisi Regional (Divre) Provinsi adalah satuan kerja Perum Bulog Divre Provinsi yang dibentuk Kadivre yang bertugas dan bertanggung jawab mengkoordinasi dalam pelaksanaan Program Raskin di Sub Divre.
3. Satker Raskin adalah satuan kerja Perum Bulog Sub Divre yang dibentuk Kasub Divre yang bertugas dan bertanggung jawab mengangkut beras dari gudang Perum Bulog sampai dengan titik distribusi dan menyerahkan kepada pelaksana distribusi.
4. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah tim yang dibentuk di tingkat Kecamatan yang dipimpin oleh Camat sebagai ketua yang beranggotakan unsur Kecamatan, Polsek, Pengelola Program KB Kecamatan dan Koordinator Sensus Kecamatan (KSK) yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan. Pelaksana Distribusi adalah Kelompok Kerja (Pokja) titik distribusi yang dibentuk berdasarkan musyawarah Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah, terdiri dari Aparat Desa/Kelurahan, Lembaga Masyarakat, dan unsur-unsur masyarakat yang bertugas dan bertanggung jawab mendistribusikan Raskin kepada penerima manfaat Raskin.

5. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras oleh Satuan Kerja (Satker) Raskin Sub Divre kepada pelaksana distribusi di Desa. Kelurahan yang dapat dijangkau penerima manfaat Raskin atau lokasi lain yang ditetapkan atas dasar kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Daerah dan Sub Divre.
6. Rumah Tangga Miskin (RTM) adalah penerima manfaat Program Raskin di Desa/Kelurahan sesuai hasil pendataan Sosial Ekonomi BPS dengan kategori sangat miskin, miskin, dan sebagian hampir miskin.
7. Musyawarah Desa/Kelurahan adalah forum komunikasi di tingkat Desa/Kelurahan untuk menetapkan RTM yang berhak menerima Raskin.
8. Beras Standar Kualitas Bulog adalah beras kualitas medium, kondisi baik dan tidak berhama.
9. Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) adalah lembaga yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur di Provinsi dan Keputusan Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota yang berfungsi menerima dan menindak lanjuti. pengaduan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung termasuk media cetak dan elektronik.

2.12 Pandangan Islam Tentang Efektifitas Sistem Pendistribusian Raskin

Efektivitas dalam Al-qur'an di jelaskan dala surat Al Isra' ayat 26 :

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya : Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya, dan kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah menghambur hamburkan (hartamu) secara boros.

Firman Allah Ta'ala, “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya” yakni seperti halnya anda menjaga hak kedua orang tua yang memutus tali silaturrahim kemudian bersedekah kepada orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Sayidina Ali menjelaskan kepada Husein tentang firman Allah swt, Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya” mereka adalah kerabat nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad saw telah memerintahkan untuk memberikan hak-hak mereka dari baitul mal yakni bagian untuk kerabat beliau dari peperangan, jarahan (rampasan perang). Ayat ini di tujukan kepada para penguasa atau orang yang berada pada kedudukan tersebut. Disamakan dengan ayat ini, sesuatu yang menjelaskan tentang silaturrahim, menutup kebutuhan, saling menolong ketika membutuhkan harta benda, dan pertolongan dalam segala hal.

Surat/surah ; An-Nisaa Ayat 36

❖ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجُنُبِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ
مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya : Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ibu-bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong dan membangga-banggakan diri.

Dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan dengan tempat, hubungan kekeluargaan, dan ada pula antar yang muslim dan yang bukan muslim. Ibnu sabil ialah orang yang dalam perjalanan yang bukan maksiat yang kehabisan bekal. Termasuk juga anak yang tidak di ketahui ibu bapaknya.

Pada pembahasan QS. An Nisa : 36 yaitu mengenai tentang “Kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia” yang mana kewajiban manusia untuk menyembah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua (ibu-bapa), karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh , dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Dan juga larangan untuk berbuat dan mengajak kikir, karena kikir merupakan sifat yang paling dibenci Allah karena ia telah kufur nikmat yaitu dengan menyembunyikan karunia yang Allah berikan. Dan terhadap orang yang berbuat demikianlah Allah telah menyediakan tempat dan siksa yang menghinakan. Dalam ayat 36 tersebut diatas, Allah menjelaskan kewajiban-kewajiban bagi seorang Muslim yang secara garis besarnya ada tiga macam. Ketiga macam kewajiban tersebut adalah :

1. Kewajiban kepada Allah, yaitu menyembah dan tidak mempersekutukannya.
2. Berbuat baik kepada kedua orang tua
3. Berbuat baik kepada masyarakat, yaitu kepada keluarga dekat, tetangga dekat dan jauh, kepada orang yang berada dalam perjalanan, dan berbuat baik kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungannya.

Dari ayat ini jelas bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak hanya berkewajiban menyembah Allah SWT, akan tetapi ia juga harus memiliki sifat peduli terhadap masyarakat di sekitarnya, sehingga boleh di katakan bahwa ibadah seseorang tidak akan sempurna bila tidak dibarengi dengan kepedulian terhadap keadaan masyarakat sekitarnya. Sebab kalau dilihat dari segi bahasa, rangkaian perintah tadi menggunakan kata sambung wa (artinya=dan). Maksudnya, kalau perintah menyembah Allah itu wajib maka berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan sebagainya juga wajib. Ayat itu diakhiri dengan “Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”. Karena orang yang sombong senantiasa meremehkan semua hak orang-orang lain, memandang orang lain rendah dan hina. Sifat angkuh dan sombong jelas akan menjauhkan seseorang dari masyarakat dan tidak disenangi oleh masyarakat, sehingga akhirnya hubungan harmonis antar sesama manusia menjadi sirna. Bila hubungan antar manusia tidak lagi berjalan dengan harmonis maka hilanglah salah satu sifat manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, sifat sombong sangat dibenci oleh Allah SWT.

Oleh karena itu, manusia sebagai khalifah di muka bumi harus juga memanifestasikan sifat-sifat-Nya ke dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, manusia dibekali amanah untuk berkebebasan dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya, menciptakan dan menjaga kehidupan dunia dan akhirat secara berkeseimbangan, dan bertanggungjawab atas pekerjaannya itu baik di dunia dalam rangka bermuamalat maupun di akhirat pada hari pembalasan.

Sebagai khalifah di bumi, manusia berkewajiban untuk memanfaatkan bumi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya yang serba berkecukupan itu untuk sebesar-besar kemaslahatan ummat, bukan untuk orang seorang, karena setiap insan beriman bahwa pemilikan mutlak adalah pada Allah swt. Untuk itu, ia harus bekerjasama dengan sesama seraya memohon bimbingan Allah. Hubungan dengan Allah dan dengan sesama dalam keseharian kerja inilah yang menjadikan suatu hasil kerja dapat disebut sebagai bermanfaat. Pemanfaatannya tidak sekedar berkisar pada tematik alokasi sumber daya yang optimal, pertukaran antar barang dan jasa melalui pasar, dan memaksimumkan laba, tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah keadilan sosial. Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan kepada Al-Qur'an dan Sunnah adalah:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
2. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang
3. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dan distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.

4. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral
5. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi

Karena itu, dalam problematika makanan pokok seperti beras ini, Islam memandang ada beberapa poin penting yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan. Pertama, hajat hidup orang banyak harus dikelola dan menjadi tanggung jawab negara. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa "manusia berserikat dalam tiga hal yaitu api, air, dan rumput". Dalam konteks kekinian, rumput dalam hadits tersebut meliputi sumber makanan pokok masyarakat. Artinya, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa rakyat dalam kondisi mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.

2.13 Hipotesa

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

“ Di duga sistem pendistribusian Raskin di Kelurahan Sorek satu kurang efektif di sebabkan oleh 4 faktor yaitu : tidak ada ketepatan dalam waktu, sasaran, jumlah administrasi dan harga”.

2.14 Definisi konsep

Masri Singarimbun (1989:31) mengatakan konsep adalah istilah dan definisi yang di gunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah :

1. Efektifitas

Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Sistem pendistribusian

Adalah pengaturan barang/jasa dari produsen ke konsumen.

3. Program Raskin

Adalah program nasional yang digulirkan untuk seluruh rakyat Indonesia dengan memberikan beras bersubsidi bagi rumah tangga miskin.

2.15 Konsep operasional

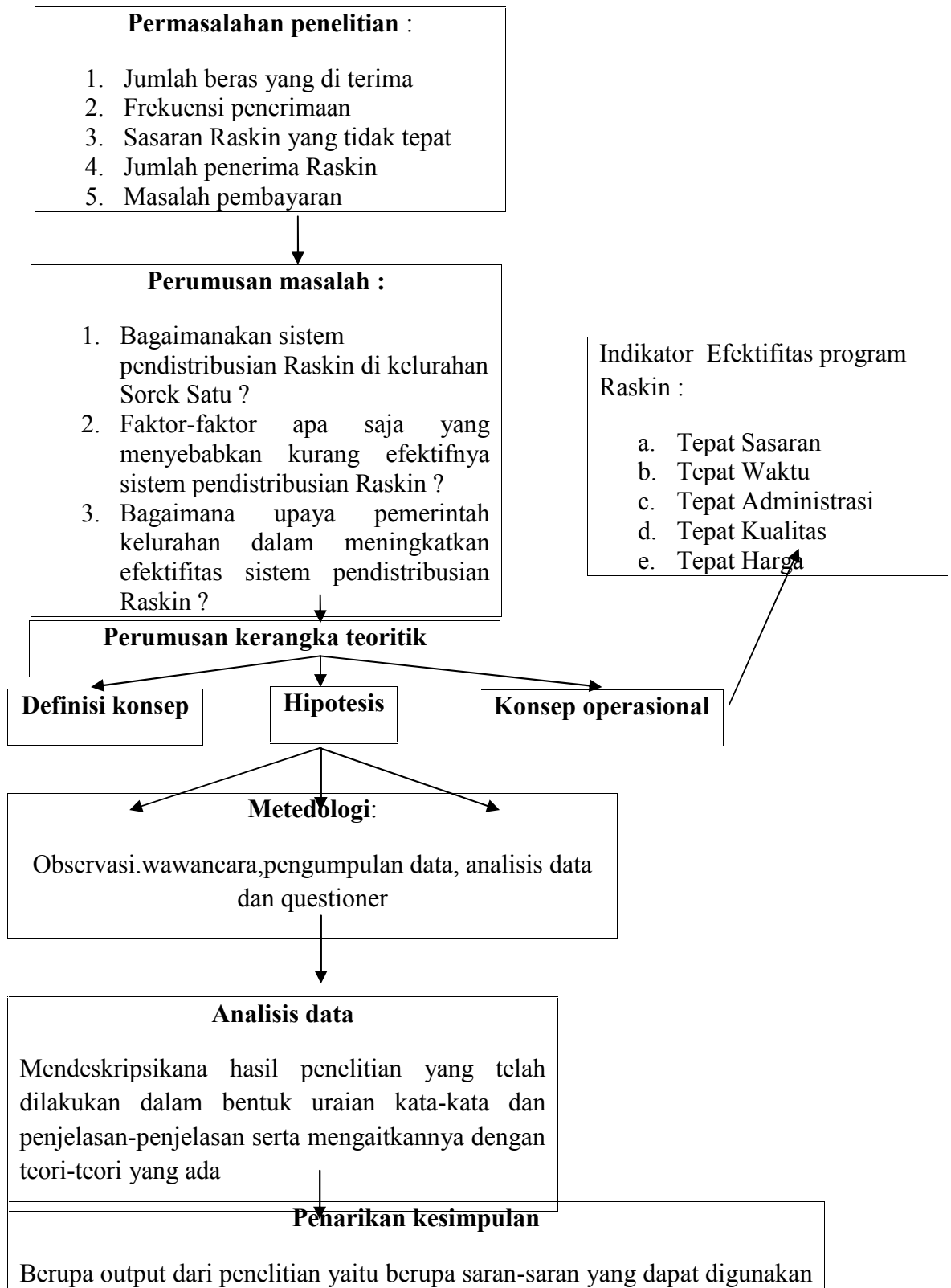
Menurut Masri Singarimbun (1989:23) Konsep operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Konsep operasional merupakan uraian konsep yang sudah dirumuskan dalam bentuk indikator-indikator yang lebih memudahkan operasional suatu penelitian. Adapun konsep operasional dalam penelitian ini adalah menurut Pedoman Umum Raskin tahun 2011 yang diterbitkan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan juga tertuang dalam pedoman umum program Raskin tahun 2012 yang diterbitkan oleh Bupati Pelalawan serta beberapa teori dari beberapa ahli yang berkaitan dengan penelitian ini. Konsep operasional akan memberikan kemudahan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian selanjutnya agar lebih terarah lagi. Dan konsep operasional dalam penelitian ini akan dicantumkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.3 : Konsep Operasional Penelitian

No.	Konsep Penelitian	Indikator	Pengertian
1.	Efektifitas program Raskin (Pedoman Umum Raskin)	a. Tepat waktu	Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTM-PM sesuai dengan rencana distribusi
		b. Tepat sasaran	Raskin hanya dapat di berikan kepada RTM-PM hasil muskel yang terdaftar di DPM-1
		c. Tepat administrasi	Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu
		d. Tepat jumlah	Jumlah beras yang merupakan hak RTM-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 15/kg/RTM/bulan atau 180 kg/RTM/tahun
		e. Tepat harga	Harga tebus Raskin adalah Rp.1600 di titik distribusi
		f. Tepat kualitas	Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras Bulog (Kualitas medium)

Sumber : Data Olahan (2012)

2.16 Kerangka Berpikir



: Dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak efektifnya sistem pendistribusian Raskin sehingga dapat dicari solusi konkrit untuk mengatasi permasalahan pendistribusian Raskin di Kelurahan Sorek Satu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian di lakukan di kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pengkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan terhitung dari bulan Oktober sampai Desember.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Adalah data yang di peroleh melalui kegiatan yang dilakukan dilokasi penelitian (lapangan), melalui penyebaran quuestioner (membuat daftar pertanyaan), wawancara dan observasi.

2. Data sekunder

Adalah data yang sudah diolah dan sudah ada sebelumnya yang di perlukan, seperti jumlah penduduk, pedoman umum Raskin baik dari Menteri koordinator kesejahteraan rakyat maupun pedoman umu Raskin Kabupaten Pelalawan, kesepakatan bersama antara bupati pelalawan dan perum Bulog dan jumlah penerima Raskin atau DPM.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang di butuhkan sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka di gunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara, merupakan kegiatan pengumpulan data yang di lakukan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang tidak di temukan dalam angket, melalui dialog langsung dengan responden terpilih secara terpimpin dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah di siapkan sebelumnya.
2. Angket/quisioner, yaitu aktifitas yang di lakukan untuk mendapatkan data dengan membuat serta menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden untuk di isi sesuai dengan alternatif jawaban yang di sediakan
3. Observasi, adalah kegiatan pengumpulan data yang di lakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian di lapangan yaitu di Kelurahan Sorek Satu.

3.4 Populasi Dan Sampel

Menurut Sugiono (2003: 90) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang di tetapkan oleh penulis untuk di pelajari dan kemudiannya.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah tangga miskin di kelurahan Sorek Satu yang terdata di BPS yaitu sebanyak 203 KK.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang di ambil untuk mewakili populasi secara keseluruhan yang akan di jadikan responden dalam suatu penelitian. Untuk penelitian ini penulis menentukan sampel berdasarkan penentuan jumlah sampel yang di kembangkan Isaac dan Michael (Sugiono, 2003:98-99) mengambil 127 responden dengan tingkat kesalahan 5%, hal ini berdasarkan tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu yang di kembangkan oleh Isaac dan Michael. Dengan pengambilan sampel melalui teknik *sampling purposive* yaitu dengan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Penulis juga melakukan wawancara dengan *Key Informan* di beberapa instansi terkait dengan menggunakan *purposive sampling* . Untuk lebih jelasnya, penetapan jumlah Populasi dan Sampel dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1. Penetapan Populasi Dan Sampel Penelitian

No.	Teknik Pengambilan Sampel	Populasi	Sampel
1.	Kuesioner	203	127
2.	Wawancara	7	7

Sumber : Data Olahan (2012)

3.5 Metode Data

Dalam menganalisis, peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai efektifitas sistem pendistribusian Raskin di kelurahan sorek satu, kemudian data di tuangkan kedalam bentuk tabel dengan angka untuk selanjutnya di analisis dengan deskriptif.

Adapun menurut Ari Kunto, dalam menganalisis penulis menuangkan dengan deskriptif kualitatif yaitu dengan menuangkan persentase dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Dimana : p = Persentase N = Total Jumlah

f = Frekuensi

Dalam melakukan kriteria penilaian, di lakukan pengelompokan menjadi 5 kriteria yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, sebagai berikut :

- a. Sangat baik = 80-100%
- b. Baik = 60-79%
- c. Cukup baik = 40-59%
- d. Kurang baik = 30-39%
- e. Tidak baik = < 30%

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kelurahan Sorek Satu

Pada permulaan berdirinya, kelurahan Sorek Satu masih merupakan hutan yang pada umumnya tanaman bambu. Pada saat itu Ibukota Kecamatan Pangkalan Kuras masih terletak di Desa Pangkalan Papan dan merupakan Kabupaten Kampar. Masyarakat pada masa itu banyak bermukim di pingiran sungai Kuala Napuh, kemudian secara berangsur-angsur pindah tempat tinggal jalan Stanvak, setelah dibangun jalan oleh PT.Pertamina sebagai akses jalan perusahaan. Yang hingga saat ini banyak didatangi oleh masyarakat berbagai daerah.

Kelurahan Sorek Satu merupakan Ibukota kecamatan Pangkalan Kuras yang merupakan Kecamatan terbesar kedua setelah kecamatan Pangkalan Kerinci di Kabupaten Pelalawan. Dengan luas wilayah 8000H .

Kelurahan Sorek Satu menjadikan masyarakat yang heterogen yang mempunyai banyak klasifikasi pekerjaan dan tingkat keamanan wilayah yang cukup baik dan mempunyai tingkat solidaritas yang masih tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dari saat diadakannya gotong royong maupun saat salah satu warga mendapatkan musibah ataupun akan melaksanakan hajatan. Maka masyarakat sekitar tidak segan-segan untuk membantu. Sehingga segala kegiatan yang berat akan menjadi lebih ringan karena solidaritas dan kebersamaan yang ada di kehidupan masyarakat kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan.

4.2 Batas Wilayah

Adapun batas wilayah kelurahan Sorek Satu adalah :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sorek Dua
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bandar Petalangan
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bunut dan Kecamatan Bandar Petalangan
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batang Kulim

4.3 Visi dan Misi Kelurahan Sorek Satu

4.3.1 Visi

Terwujudnya kelurahan sorek satu yang aman dan sejahterah melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian yang tangguh, dengan masyarakat yang rukun, harmonis dan beriman serta lingkungan yang bersih, tertib dan beradab tahun 2015.

4.3.2 Misi

1. Meningkatkan ketakwaan kepada tuhan yang Maha Esa dan membina toleransi antar umat beragama.
2. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat
3. Memanfaatkan sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan
4. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat atas misi kelurahan sorek satu demi terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Pelalawan.

4.4 Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki Oleh Kantor Kelurahan Sorek Satu

Sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Sorek Satu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 : Sarana Dan Prasarana Di Kantor Kelurahan Sorek Satu

SUB INDIKATOR	KONDISI
Sarana dan Prasarana	
a. Gedung Kantor	Baik
b. Gedung Pertemuan	Ada
c. Perangkat Kelurahan	Tidak lengkap
d. Mesin Tik/Komputer	Ada
e. Kendaraan Dinas Luar	Ada
f. Struktur organisasi	Ada
1. Keuangan	
a. APBD Kelurahan	Ada
b. Belanja Pembangunan	Tidak Lengkap
c. Bantuan atau Hibah Lainnya	Ada
2. Akuntabilitas	
a. Kotak Pengaduan Masyarakat	Ada
b. Laporan Kinerja Tahunan	Ada
c. Laporan Ahir Jabatan Lurah	Ada
d. Papan Informasi Pelayanan	Ada
3. Administrasi	
a. Buku Registrasi Pelayanan	Ada
b. Buku Profil Kelurahan	Ada

c. Administrasi Keuangan	
d. Kartu Uraian Tugas	Ada
e. Administrasi Penduduk	Ada
f. Administrasi pembangunan	Ada
g. Buku Data Lembaga Kemasyarakatan	Ada
h. Buku Registrasi Umum	Ada
i. Peta Wilayah	Ada

Sumber : Kelurahan Sorek Satu (2012)

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa sarana dan prasarana yang di miliki Kelurahan Sorek Satu telah memadai untuk menjalankan kegiatannya.

4.5 Kondisi Wilayah

Keadaan topografi kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras pada umumnya dataran rendah serta sebagian perbukitan sehingga tanahnya cukup subur untuk di jadikan lahan pertanian. Itu terlihat dari beberapa daerah di kelurahan Sorek Satu terdapat perkebunan kelapa sawit dan perkebunan sayuran yang menjadi mata pencaharian sampingan bagi beberapa masyarakat di kelurahan Sorek Satu.

4.6 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk yang ada di kelurahan Sorek Satu berjumlah 11.281 jiwa yang tersebar di 9 wilayah RW dan 29 wilayah RT. Adapun data penduduk berdasarkan usia pada tahun 2010-2011 dapat di lihat pada tabel :

Tabel 4.2 : Data Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2010-2011

NO .	Indikator	Jumlah					
		Tahun I			Tahun II		
		LK	PR	Jumlah	LK	PR	Jumlah
1.	0-12 bulan	101	161	262	171	134	305
2.	1-5 tahun	395	397	792	400	312	712
3.	5-7 tahun	339	374	713	440	265	705
4.	7-15 tahun	1671	1244	2915	1608	1242	2850
5.	15-56 tahun	2763	2590	5358	2725	2659	5385
6.	56 tahun keatas	599	650	1249	680	470	5150
	Jumlah	5873	5416	11.289	6024	5082	11.106

Sumber : Kelurahan Sorek Satu (2012)

Sedangkan Data penduduk berdasarkan Gender , dapat dilihat pada tabel :

Tabel 4.3 : Data Penduduk Berdasarkan Gender Tahun 2010-2011

NO	Indikator	Jumlah	
		Tahun I	Tahun II
1.	Jumlah penduduk	11.289 Jiwa	11.176 Jiwa
2.	Jumlah Laki-laki	5873 Jiwa	6024 Jiwa
3.	Jumlah Perempuan	5416 Jiwa	5082 Jiwa
4.	Jumlah kepala keluarga	2828 Jiwa	2692 Jiwa

Sumber : Kelurahan Sorek Satu (2012)

4.7 Mata Pencarian Penduduk Kelurahan Sorek Satu

Karena penduduk di Kelurahan Sorek Satu heterogen, dari berbagai daerah dan suku maka hal ini juga menyebabkan mata pencarian yang di miliki penduduk juga beragam. Hal ini dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4 : Mata Pencarian Penduduk Kelurahan Sorek Satu

No.	Jenis Mata Pencarian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Pedagang	673	33,54%
2.	Petani	621	31,25%
3.	PNS	576	28,71%
4.	Buruh	136	6,50%
Jumlah		2006	100%

Sumber : Kelurahan Sorek Satu (2012)

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa mayoritas penduduk di kelurahan sorek satu memiliki mata pencaharian berdagang, sebanyak 673 orang atau 33,53%, petani sebanyak 621 orang atau 31,25%, dan PNS sebanyak 576 orang atau 28,71% sedangkan buruh sebanyak 136 orang atau 6,50%

1.8 Jumlah Kepercayaan Yang Ada Di Kelurahan Sorek Satu

Tingkat kepercayaan penduduk kelurahan Sorek Satu sangat beragam hal ini di karenakan pendatang di kelurahan sorek satu yang terus menerus meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah penduduknya terus bertambah serta keragaman kepercayaan yang dianut penduduknya pun ikut beragam. Hal ini dapat di lihat pada tabel 4.5 di bawah ini :

Tabel 4.5: Jumlah kepercayaan yang Dianut Penduduk Di Kelurahan Sorek Satu

No.	Agama	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Islam	10.550	95%
2.	Protestan	323	2,90%
3.	Hindu	20	0,18%
4.	Khatolik	213	1,92%
Jumlah		11106	100%

Sumber : Kelurahan Sorek Satu (2012)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk di kelurahan sorek satu beragama islam, yaitu mencapai 95% atau 10.550 orang yang kemudian agama khatolik sebanyak 1,92% atau 213 orang. Agama protestan sebanyak 323 orang atau 2,90% dan agama hindu sebanyak 20 orang atau 0,18%.

1.7 Tingkat Perkembangan Pendidikan dan Perekonomian di Kelurahan Sorek Satu

Data tingkat pendidikan dan perekonomian yang ada di Kelurahan Sorek Satu, jika di analisis tingkat pendidikan akan mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat yang ada di kelurahan sorek satu. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan tinggi pula tingkat pekerjaannya. Maka dari itu penulis akan menggambarkan tingkat pendidikan dan perekonomian sorek satu pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6 : Data Tingkat Perkembangan Pendidikan di Kelurahan Sorek Satu

NO	Indikator	Sub Indikator	Jumlah
			Tahun 2011
1.	Pendidikan penduduk usia 15 tahun keatas	1. Jumlah penduduk buta huruf	35 orang
		2. Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat	321 orang
		3. Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat	1738 Orang
		4. Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat	255 Orang
		5. Jumlah penduduk tamat SLTA/ sederajat	1126 Orang
		6. Jumlah penduduk tamat DI	35 Orang
		7. Jumlah penduduk tamat DII	120 orang
		8. Jumlah penduduk tamat DIII	250 orang
		9. Jmlah penduduk tamat SI	768 orang
2.	Wajib belajar 9 tahun dan putus sekolah	1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun masih sekolah	2620 orang
		2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun putus sekolah	10 orang
3.	Prasarana sekolah	1. Jumlah SLTA/ sederajat	3 Buah
		2. Jumlah SLTP/sederajat	3 Buah
		3. Jumlah SD/ sederajat	3 Buah
		4. Lembaga pendidikan agama	5 Buah

Sumber : Kelurahan Sorek Satu (2012)

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa tingkat pendidikan di kelurahan sorek satu sudah baik, walaupun masih ada penduduk yang buta huruf. Dan dari segi prasarana sekolah telah sangat memadai. Prasarana sekolah yang di miliki telah mampu menunjang kegiatan belajar mengajar yang ada di kelurahan sorek satu kecamatan pangkalan kuras.

Dan untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang ada di kelurahan sorek satu dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.7 : Data Pertumbuhan Ekonomi Mastarakat

NO	Indikator	Sub Indikator	Jumlah
			Tahun 2011
1.	Pengangguran	1. Jumlah penduduk usia kerja 15-56 tahun	5397 orang
		2. Jumlah penduduk usia 15-56 tahun tidak bekerja	710 orang
		3. Penduduk usia 15-56 tahun menjadi IRT	2600 orang
		4. Penduduk usia 7-15 tahun cacat hingga tidak dapat bekerja	16 orang
2.	Tingkat kesejahteraan	1. Jumlah keluarga	2692
		2. Jumlah keluarga sejahterah	206 orang
		3. Jumlah keluarga sejahtera I	441 orang
		4. Jumlah keluarga sejahtera II	795 orang
		5. Jumlah keluarga sejahtera	1170 orang
		6. Jumlah keluarga sejahtera III plus	80 Orang

Sumber : Kelurahan Sorek Satu (2012)

4.8 PERUM BULOG

Bulog adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak dibidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/ pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, Bulog tetap melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar Pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan.

4.9 Sejarah Perusahaan

Sejarah perkembangan Bulog tidak dapat terlepas dari sejarah lembaga pangan di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan sampai pemerintahan sekarang ini. Secara umum tugas lembaga pangan tersebut adalah untuk menyediakan pangan bagi masyarakat pada harga yang terjangkau diseluruh daerah serta mengendalikan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Instrumen untuk mencapai tujuan tersebut dapat berubah sesuai kondisi yang berkembang.

Campur tangan pemerintah dalam komoditas beras diawali sejak Maret 1933 yaitu di zaman pemerintahan Belanda. Saat itu, untuk pertama kalinya pemerintah Belanda mengatur kebijakan perberasan, yaitu dengan menghapus

impor beras secara bebas dan membatasi impor melalui sistem lisensi. Latar belakang ikut campurnya pemerintah Belanda dalam perberasan waktu itu adalah karena terjadinya fluktuasi harga beras yang cukup tajam (tahun 1919/1920) dan sempat merosot tajam pada tahun 1930, sehingga petani mengalami kesulitan untuk membayar pajak.

Menjelang pecahnya Perang Dunia II, pemerintah Belanda memandang perlu untuk secara resmi dan permanen mendirikan suatu lembaga pangan. Tanggal 25 April 1939, lahirlah suatu lembaga pangan yang disebut Voeding Middelen Fonds (VMF). Lembaga pangan ini banyak mengalami perubahan nama maupun fungsi. Secara ringkas, perkembangannya sebagai berikut:

1. Tahun 1939 didirikan VMF yang tugasnya membeli, menjual dan mengadakan persediaan bahan makanan.
2. Tahun 1942-1945 (zaman pendudukan Jepang) VMF di bekukan dan diganti dengan "Sangyobu Nanyo Kohatsu Kaisha".
3. Tahun 1945-1950, terdapat 2 organisasi, yaitu: Di Daerah RI: Di dirikan Jawatan Pengawasan Makanan Rakyat (PMR) dan pada Tahun 1947/48 dibentuk Kementrian Persediaan Makanan Rakyat sedang didaerah yang diduduki Belanda: VMF di hidupkan kembali dengan tugas seperti yang telah di jalankan ditahun 1939.
4. Sedang Tahun 1950 dibentuk Yayasan Bahan Makanan (BAMA) (1950-1952) yang tugasnya yaitu membeli, menjual dan mengadakan persediaan pangan.

5. Tahun 1952 fungsi dari Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM) (1952-1958) ini lebih banyak berhubungan dengan masalah distribusi/pemerataan pangan. Dalam periode ini mulailah dilaksanakan kebijaksanaan dan usaha stabilisasi harga beras melalui injeksi di pasaran.
6. Tahun 1958 selain YUBM yang ditugaskan untuk impor didirikan pula YBPP (Yayasan Badan Pembelian Padi) (1958-1964) yang dibentuk di daerah-daerah dan bertugas untuk membeli padi. Dengan meningkatnya harga beras dan terjadinya tekanan-tekanan dari golongan penerima pendapatan tetap, pemerintah pada periode ini meninggalkan prinsip stabilisasi melalui mekanisme pasar dan beralih pada distribusi fisik.
7. Tahun 1964 YUBM dan YBPP dilebur menjadi BPUP (Badan Pelaksana Urusan Pangan) (1964-1966). Tugas badan ini mengurus persediaan bahan pangan di seluruh Indonesia.
8. Tahun 1966 BPUP dilebur menjadi Kolognas (Komando Logistik Nasional) (1966-1967). Tugas Kolognas adalah mengendalikan operasional bahan-bahan pokok kebutuhan hidup. Kebijakan dan tindakan yang diambil untuk menanggulangi kekurangan stok waktu itu adalah mencari beras luar negeri.
9. Tahun 1967 KOLOGNAS dibubarkan, diganti dengan Bulog (Badan Urusan Logistik) (1967-1969) yang dibentuk dengan KEPPRES No. 114/KEP, 1967. Berdasarkan KEPPRES RI No. 272/1967, Bulog dinyatakan sebagai "Single Purchasing Agency" dan Bank Indonesia ditunjuk sebagai Single Financing Agency (Inpres No. 1/1968).

10. Pada tanggal 22 Januari 1969 (Reorganisasi Bulog) berdasarkan KEPPRES 11/1969, struktur organisasi Bulog diubah. Tugas Bulog yaitu membantu Pemerintah untuk menstabilkan harga pangan khususnya 9 bahan pokok. Tahun 1969 mulailah dibangun beberapa konsep dasar kebijaksanaan pangan yang erat kaitannya dengan pola pembangunan ekonomi nasional antara lain : konsep floor dan ceiling price; konsep bufferstock; dan Sistem serta tata cara pengadaan, pengangkutan, penyimpanan dan penyaluran.

Tugas Bulog semakin bertambah. Komoditi yang dikelola bertambah menjadi gula pasir (1971), terigu (1971), daging (1974), jagung (1978), kedelai (1977), kacang tanah (1979), kacang hijau (1979), telur dan daging ayam pada Hari Raya, Natal/Tahun Baru. Kebijakan Stabilisasi Harga Beras yang berorientasi pada operasi bufferstock dimulai tahun 1970.

Stabilisasi harga bahan pangan terutama yang dikelola Bulog masih tetap menjadi tugas utama di era 1980-an. Orientasi bufferstock bahkan ditunjang dengan dibangunnya gudang-gudang yang tersebar di wilayah Indonesia. Struktur organisasi Bulog diubah sesuai Keppres No. 39/1978 tanggal 6 Nopember 1978 dengan tugas membantu persediaan dalam rangka menjaga kestabilan harga bagi kepentingan petani maupun konsumen sesuai kebijaksanaan umum Pemerintah.

Penyempurnaan organisasi terus dilakukan. Melalui Keppres RI No. 50/1995 Bulog di tugaskan mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, tepung terigu, kedelai, pakan, dan bahan pangan lainnya. Namun, seiring

dengan perkembangan ekonomi global, tugas pokok Bulog dipersempit melalui Keppres No. 45 / 1997 tanggal 1 Nopember 1997 yaitu hanya mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras dan gula. Selang beberapa bulan, sesuai LOI tanggal 15 Januari 1998, Bulog hanya memonopoli beras saja.

Liberalisasi beras mulai di laksanakan sesuai Keppres RI no. 19/1998 tanggal 21 Januari 1998 dan tugas pokok Bulog hanya mengelola beras saja. Tugas pokok Bulog diperbaharui kembali melalui Keppres no. 29/2000 tanggal 26 Pebruari 2000 yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi, pengendalian harga beras dan usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas tersebut tidak berjalan lama karena mulai 23 Nopember 2000 keluar Keppres No. 166/2000 dimana tugas pokoknya melaksanakan tugas pemerintah bidang manajemen logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya, Keppres No. 103/2001 tanggal 13 September 2001 mengatur kembali tugas dan fungsi Bulog. Tugasnya melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen logistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Selama lebih dari 30 tahun Bulog telah melaksanakan penugasan dari pemerintah untuk menangani bahan pangan pokok khususnya beras dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional, timbul tekanan yang sangat kuat agar

peran pemerintah dipangkas secara drastis sehingga semua kepentingan nasional termasuk pangan harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Tekanan tersebut terutama muncul dari negara-negara maju pemberi pinjaman khususnya AS dan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank.

Dan pada akhirnya era baru itu datang juga, sejak tanggal 20 Januari 2003 LPND Bulog secara resmi berubah menjadi Perum Bulog berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2003 yang kemudian direvisi menjadi PP RI No. 61 Tahun 2003. Peluncuran Perum Bulog ini dilakukan di Gedung Arsip Nasional Jakarta pada tanggal 10 Mei 2003.

Berdasarkan hasil kajian, ketentuan dan dukungan politik DPR RI, disimpulkan bahwa status hukum yang paling sesuai bagi Bulog adalah Perum. Dengan bentuk Perum, Bulog tetap dapat melaksanakan tugas publik yang dibebankan oleh pemerintah terutama dalam pengamanan harga dasar pembelian gabah, pendistribusian beras untuk masyarakat miskin yang rawan pangan, pemupukan stok nasional untuk berbagai keperluan publik menghadapi keadaan darurat dan kepentingan publik lainnya dalam upaya mengendalikan gejolak harga. Disamping itu, Bulog dapat memberikan kontribusi operasionalnya kepada masyarakat sebagai salah satu pelaku ekonomi dengan melaksanakan fungsi usaha yang tidak bertentangan dengan hukum dan kaidah transparansi. Dengan kondisi ini gerak lembaga Bulog akan lebih fleksibel dan hasil dari aktivitas usahanya sebagian dapat di gunakan untuk mendukung tugas publik, mengingat semakin terbatasnya dana pemerintah di masa mendatang. Dengan kondisi tersebut di

harapkan perubahan status Bulog menjadi Perum dapat lebih menambah manfaat kepada masyarakat luas.

4.10 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan hukum pendirian Perum Bulog PP No. 7 Tahun 2003 di sebutkan bahwa Tupoksi Perum Bulog dibagi atas 2 kategori, sebagai berikut :

A. Tugas Pelayanan Publik (Public Service Obligation)

Adapun tugas pokok dan fungsi dalam bidang pelayanan publik, antara lain :

1. Melakukan pengadaan Dalam Negeri sesuai ketentuan Harga pembelian Pemerintah (HPP) yang berlaku.
2. Menyalurkan atau mendistribusikan beras untuk rumah tangga miskin (Raskin).
3. Mengelola cadangan beras pemerintah (CBP) dalam hal penanganan bencana alam, kerawanan pangan dan sekaligus menjaga stabilitas harga beras ditingkat konsumen (pasar).

Tugas Komersial (Trading)

Sementara Tugas pokok dan fungsi Perum Bulog dalam bidang komersial antara lain :

1. Pengembangan industri beras dan turunnya (tepung, menir, katul dan sekam)

2. Pengembangan jasa logistik, jasa survey, jasa perawatan kualitas maupun optimalisasi asset untuk mendukung kegiatan pelayanan publik.
3. Ikut serta dalam sinergi BUMN di bidang pangan.
4. Perdagangan komoditi pangan dengan fokus pada beras, gula, jagung dan kedelai.
5. Pengembangan anak perusahaan di bidang industri, perdagangan dan jasa.

Untuk proses pelaksanaan kegiatan perusahaan, Perum Bulog membagi tanggungjawab kerja berdasarkan wilayah cakupannya. Dimana untuk seluruh Indonesia di koordinir oleh Kantor Pusat sedangkan untuk masing-masing provinsi diberikan tanggungjawab kepada Divisi Regional.

4.11 Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya perusahaan yang handal dalam pencapaian ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

Misi

1. memenuhi kecukupan pangan pokok secara aman, bermutu, stabil dan terjangkau.
2. Mewujudkan SDM profesional, jujur, amanah dan menerapkan prinsip-prinsip GCG di bidang pangan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Sebelum penulis membahas dan menganalisa lebih lanjut tentang efektifitas sistem pendistribusian Raskin Di kelurahan Sorek Satu maka terlebih dahulu penulis memaparkan identitas responden yang berjumlah 203 RTM dan terdaftar di DPM (Daftar Penerima Manfaat) yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

5.1.1 Responden Menurut Jenis Kelamin

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai identitas responden berikut ini penulis akan menguraikan mengenai identitas responden menurut jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.1 : Jenis Kelamin Responden

No	Jenis kelamin	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	92	72,44 %
2.	Perempuan	35	27,56 %
JUMLAH		127	100 %

Sumber: Data Olahan 2012

Dari tabel 5.1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel untuk responden sebanyak 127 orang, yang keseluruhannya terdiri dari 92 responden laki-laki atau 72,44%, sedangkan responden perempuan sebanyak 35 responden atau 27,56%. Jadi jumlah keseluruhan jumlah responden yang di jadikan sampel adalah 127 orang. Dan responden terbanyak adalah laki-laki.

5.1.2 Responden Menurut Tingkat Usia

Secara teoretis faktor usia akan mempengaruhi seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Demikian pula dalam menentukan pilihan, usia akan memberikan pengaruh, semakin tinggi tingkat usia semakin baik karena tingkat kematangan emosi seseorang dalam berfikir. Selanjutnya tingkat usia juga akan mempengaruhi seseorang melakukan setiap aktifitas dalam kehidupannya. Karena itu tingkat usia selalu di jadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang. Faktor usia juga mempengaruhi pola pikir dan standar kemampuan fisik dalam suatu pekerjaan tingkat usia responden dapat dilihat dalam tabel 5.2 di bawah ini:

Tabel 5.2 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia	Jumlah Orang	Persentase (%)
1	30 – 35	6	4,72%
2	36 – 40	16	12,60%
3	41 – 45	20	15,75%
4	46 – 50	19	14,96%
5	51 – 55	20	15,75%
6	56 – 60	22	17,32%
7	61 tahun ke atas	24	18,90%
	Jumlah	127	100%

Sumber : Data olahan 2012

Dari tabel 5.2 di atas dapat dilihat bahwa responden berumur 33-35 tahun sebanyak 6 orang atau 4,72%, responden berumur 36-40 tahun sebanyak 16 orang atau 12,60%, responden berumur 41-45 sebanyak 20 orang atau 15,76%,

responden berusia 46-50 tahun sebanyak 19 orang atau 14,96%, responden berumur 51-55 tahun sebanyak 20 orang atau 15,75%, responden berusia 56-60 sebanyak 22 atau 17,32%, responden berumur 61 tahun ke atas sebanyak 24 orang atau 18,90%, yang terbanyak adalah berumur 61 tahun ke atas yaitu sebanyak 18,90%. Jadi dapat di katakan bahwa responden dalam penelitian ini adalah mereka yang berusia 61 tahun ke atas.

5.1.3 Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Responden menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 5.3 di bawah ini :

Tabel 5.3 : Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No	Responden	Jumlah (orang)	Persentase%
1	Tidak bersekolah	14	11,02%
2	Tamat SD	70	55,11%
3	Tamat SMP	36	28,35%
4	Tamat SMA	6	4,73%
5	Tamat STM	1	0,79%
	Jumlah	127	100%

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel 5.3 di atas, dapat dilihat bahwa 14 orang dari seluruh responden tidak bersekolah atau sebanyak 11,02%, 70 orang responden atau 55,11%, tamat tingkat Sekolah Dasar (SD), tamat SMP sebanyak 36 orang atau 28,35% , tamat SMA sebanyak 6 orang atau 4,73% sedangkan yang paling sedikit yaitu tamat pada tingkat STM sebanyak 1 orang responden atau 0,79%, Maka dapat di

akumulasikan bahwa tingkat pendidikan SD lebih dominan, artinya tidak banyak yang mengetahui bagaimana sebenarnya peraturan pendistribusian Raskin di Kelurahan Sorek Satu baik mekanisme pendistribusian Raskin maupun bagaimana penetapan penerima manfaat Raskin sehingga masih banyak terjadi salah anggap di kalangan masyarakat. Tingkat pendidikan sebagai dasar pertimbangan untuk mempedomani segala sesuatu yang menyangkut dengan keterangan, tanggapan, dan jawaban-jawaban yang di berikan responden pada masalah variabel penelitian maka penulis terlebih dahulu melihat dari segi latar belakang tingkat pendidikan responden.

5.1.3 Responden Menurut Mata Pencarian

Mata pencarian dapat menjadi indikator dalam mengukur tingkat kemiskinan di masyarakat, karena dari mata pencarian yang ada kita dapat memperkirakan pendapatan yang diperoleh maka dari itu perlu di tabulasikan terlebih dahulu tentang jenis mata pencarian dari tiap responden. Mengingat juga mata pencaharian masyarakat di kelurahan Sorek Satu yang beragam atau bervariasi. Adapun jenis mata pencarian dari tiap responden yang di teliti dapat di lihat dari tabel 5.4 di bawah ini :

Tabel 5.4 : Responden Menurut Mata Pencarian

No	Jenis mata pencaharian	Jumlah (orang)	Persentase%
1	Buruh	42	33,07%
2	Pedagang	30	23,62%
3	Pembantu rumah tangga	15	11,81%
4	Penarik becak	15	11,81%
5	Petani	4	3,15%
6	Penjahit	7	5,51%
7	Pemulung	3	2,36%
8	Juru parkir	1	0,79%
9	Penjaga sekolah	1	0,79%
10	Karyawan swasta	4	3,15%
11	Petugas kebersihan	1	0,79%
12	Penjaga toko	1	0,79%
13	Sopir	2	1,57%
14	Penggali sumur	1	0,79%
	Jumlah	127	100%

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa banyak responden yang memiliki pekerjaan buruh yaitu sebanyak 42 orang atau 33,07% . sedangkan jenis pekerjaan yang paling sedikit adalah juru parkir, penjaga sekolah, petugas kebersihan, penjaga toko, dan penggali sumur dengan masing-masing sebanyak 1 orang atau 0,79%. Jadi dapat di simpulkan bahwa jenis pekerjaan yang paling banyak di geluti oleh responden adalah Buruh.

5.2 Sistem Pendistribusian Raskin (Beras Bersubsidi Untuk Rumah Tangga Miskin) Di Kelurahan Sorek Satu.

Program Raskin adalah program nasional yang bertujuan membantu rumah tangga miskin dalam memenuhi kecukupan kebutuhan pangan dan mengurangi beban finansial melalui penyediaan beras bersubsidi. Program ini merupakan kelanjutan Program Operasi Pasar Khusus (OPK) yang di luncurkan pada Juli 1998. Pada 2007, Program Raskin menargetkan penyediaan 1,9 juta ton beras bagi 15,8 juta rumah tangga miskin dengan total biaya Rp 6,28 triliun. Setiap rumah tangga menerima 10 kg beras setiap bulan dengan harga Rp1.000 per kilogram di titik distribusi. Penyaluran beras hingga titik distribusi menjadi tanggung jawab Bulog, sementara dari titik distribusi kepada rumah tangga sasaran menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Setelah Raskin sampai ke Titik Distribusi, maka Untuk selanjutnya Pemerintah Daerah menyampaikan beras tersebut kepada RTS-PM dengan 6 (enam) Tepat (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, Tepat Waktu, Tepat Harga dan Tepat Administrasi). Oleh karena itu pelaksanaan Program Raskin sangat tergantung pada peran Pemerintah Daerah seperti sosialisasi, pengawasan mutu, angkutan, biaya operasional dll.

Program Raskin telah mengalami beberapa kali penyesuaian, namun efektifitasnya masih di perdebatkan. Dari sisi penyaluran hingga titik distribusi, Badan Urusan Logistik (Bulog) telah melaksanakan tugasnya dengan relatif baik dan sesuai dengan pedoman program. Namun, penilaian keberhasilan program tidak dapat di lakukan secara parsial karena Program Raskin merupakan sebuah kesatuan program untuk menyampaikan beras bersubsidi kepada rumah tangga

miskin. Permasalahan pelaksanaan Program Raskin banyak terjadi dari titik distribusi hingga rumah tangga penerima.

Menurut Pedoman Umum (Pedum) Raskin, keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Secara umum, hasil kajian terhadap pelaksanaan Program Raskin menunjukkan bahwa efektifitas sistem pendistribusian masih relatif lemah. Hal ini ditandai oleh sosialisasi dan transparansi yang kurang memadai; target penerima, harga, jumlah, dan frekuensi penerimaan beras yang kurang tepat; biaya pengelolaan program yang tinggi; pelaksanaan pemantauan yang belum optimal; dan mekanisme pengaduan yang kurang berfungsi.

Sampai dengan tahun 2006, data penerima manfaat Raskin masih menggunakan data dari BKKBN yaitu data keluarga prasejahtera alasan ekonomi dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi. Belum seluruh KK Miskin dapat dijangkau oleh Raskin. Hal inilah yang menjadikan Raskin sering dianggap tidak tepat sasaran, karena rumah tangga sasaran berbagi dengan KK Miskin lain yang belum terdaftar sebagai sasaran.

Mulai tahun 2007, di gunakan data Rumah Tangga Miskin (RTM) BPS sebagai data dasar dalam pelaksanaan Raskin. Dari jumlah RTM yang tercatat sebanyak 19,1 juta RTS, baru dapat di berikan kepada 15,8 juta RTS pada tahun 2007, dan baru dapat di berikan kepada seluruh RTM pada tahun 2008. Dengan jumlah RTS 19,1 juta pada tahun 2008, berarti telah mencakup semua rumah

tangga miskin yang tercatat dalam Survei BPS tahun 2005. Jumlah sasaran ini juga merupakan sasaran tertinggi selama Raskin di salurkan. Penggunaan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) hasil pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2008 (PPLS – 2008) dari BPS di berlakukan sejak tahun 2008 yang juga berlaku untuk semua program pengentasan kemiskinan yang di laksanakan oleh Pemerintah.

Realisasi Raskin selama 2005 - 2009 berkisar antara 1,6 juta ton - 3,2 juta ton. Dengan harga tebus Rp.1.000/kg sampai dengan 2007 dan Rp.1.600/kg sejak tahun 2008, Raskin bukan hanya telah membantu rumah tangga miskin dalam memperkuat ketahanan pangannya, namun juga sekaligus menjaga stabilitas harga. Raskin telah mengurangi permintaan beras ke pasar oleh sekitar 18,5 juta pada tahun 2009. Selain itu, perubahan harga tebus dari Rp.1.000/kg menjadi Rp.1.600/kg juga dengan mempertimbangkan anggaran dan semakin banyaknya rumah tangga sasaran yang dapat dijangkau. Harga ini juga masih lebih rendah dari harga pasar yang saat itu rata-rata sekitar Rp.5.000 – 5.500/kg.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan Raskin selama ini terutama dalam pencapaian ketepatan indikator maupun ketersediaan anggaran. Sampai dengan saat ini, jumlah beras yang akan di salurkan baru di tetapkan setelah anggarannya tersedia. Selain itu ketetapan atas jumlah beras raskin yang di sediakan juga tidak selalu di lakukan pada awal tahun, dan sering di lakukan perubahan di pertengahan tahun karena berbagai faktor. Hal ini akan menyulitkan dalam perencanaan penyiapan stoknya, perencanaan pendanaan dan perhitungan biaya-biayanya.

Apresiasi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota patut diberikan karena perhatian terhadap penyediaan dan pengalokasian APBD serta pengawasan terhadap pelaksanaan Raskin. Kepedulian terhadap program Raskin berarti kepedulian terhadap RTM yang muncul dari hati nurani untuk mengentaskan kemiskinan. Kesadaran bahwa Raskin merupakan tugas bersama Pemerintah Pusat dan Daerah untuk membantu mengurangi beban pengeluaran 18,5 juta RTM (pada tahun 2009), perlu terus di tumbuhkan.

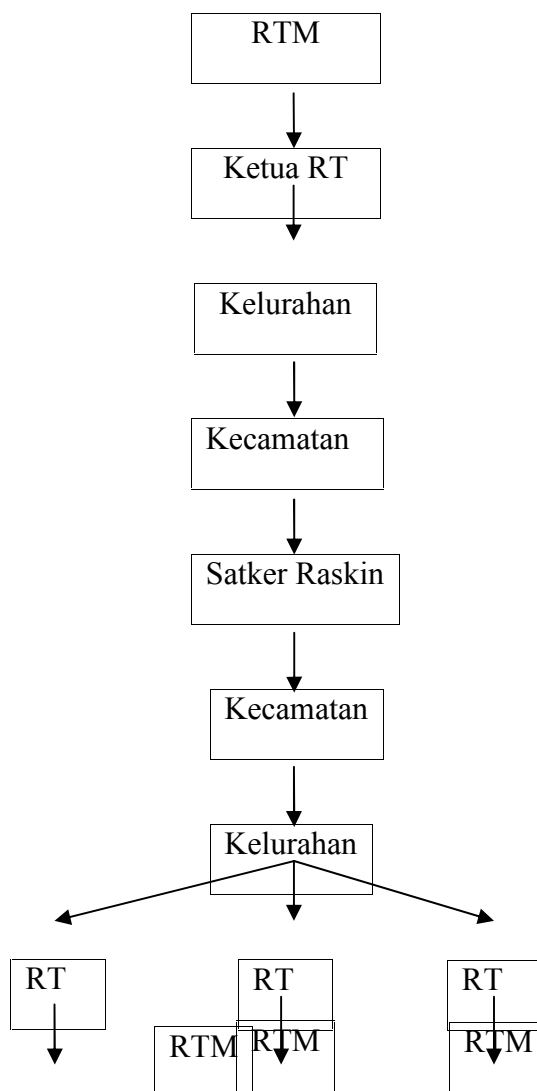
Untuk mencapai tepat sasaran, tepat harga dan tepat waktu, beberapa penyempurnaan terus di lakukan. Salah satunya adalah dengan pola distribusi yang berkembang tidak hanya melalui titik distribusi yang langsung disalurkan kepada RTS namun juga melalui Warung Desa (Wardes). Melalui Wardes, penyaluran Raskin menjadi lebih dekat kepada RTS dan RTS membeli beras secara bertahap sesuai daya belinya selama 1 bulan dengan harga sesuai dengan ketetapan. Penyaluran melalui Wardes berawal dari pilot project pada akhir tahun 2008 dan mulai di implementasikan sejak tahun 2009.

Sejak di luncurkannya program bantuan pangan bersubsidi pada Juli 1998 dengan sebutan Operasi Pasar Khusus (OPK) Beras, sampai saat ini telah banyak pihak yang menyoroti, mengkritik maupun memuji pelaksanaannya. Perubahan nama program dari OPK menjadi Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) pada tahun 2002 bertujuan untuk lebih mempertajam ketepatan sasaran penerima manfaat (*self targeting*).

Dalam pelaksanaan penyaluran beras Raskin, perlu penegasan kembali bahwa Raskin bukan hanya program Perum Bulog tetapi menyangkut semua pihak. Perlu kerjasama dengan Pemda dan jajarannya.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan di sajikan alur pendistribusian Raskin yang ada di Kelurahan Sorek Satu.

Gambar 5.1 : Alur Pendistribusian Raskin Di Kelurahan Sorek Satu



Sumber : Data Olahan (2012)

Alur pendistribusian Raskin di kelurahan Sorek Satu diawali dengan pihak kecamatan mentransfer sejumlah uang berdasarkan banyaknya beras yang akan didistribusikan di kecamatan Pangkalan Kuras. Di Pangkalan Kuras sendiri memiliki 1706 RTM yang tersebar di 17 desa/ kelurahan. Sebelumnya pihak desa/kelurahan menyeter uang Raskin pada pihak kecamatan sejumlah beras yang akan diterima pihak desa/ kelurahan, dan untuk kelurahan Sorek Satu memiliki 203 RTM yang tersebar di 29 RT. Setelah uang ditransferkan dari pihak kecamatan kepada pihak Bulog maka pihak kecamatan akan menginformasikan kepada Satgas Raskin yang bertugas di kabupaten Pelalawan untuk mendistribusikan Raskin di kelurahan Sorek Satu. Kemudian Satgas Raskin tersebut akan menyiapkan beras untuk didistribusikan ke kecamatan Pangkalan Kuras. Setelah sampai di kecamatan beras langsung dibongkar dan ditempatkan di rumah Dinas Kecamatan, hal ini dilakukan karena kecamatan Pangkalan Kuras tidak memiliki gudang tersendiri. Langkah selanjutnya pihak kecamatan akan mendistribusikan pada desa/kelurahan yang ada, setelah beras sampai di /kelurahan Sorek Satu maka pelaksana distribusi Raskin kelurahan Sorek Satu akan mengirim informasi kepada semua ketua RT yang ada di kelurahan Sorek Satu. Kemudian ketua RT akan membawa beras Raskin ke rumahnya (titik bagi) sesuai dengan jumlah RTM yang ada di wilayahnya. Setelah beras Raskin tersebut sampai maka ketua RT akan langsung membagikan pada RTM yang ada. Setiap RTM akan dibebani dengan biaya transportasi, upah timbang dan pembelian kantong plastik. Begitulah sistem pendistribusian Raskin yang ada di kelurahan Sorek Satu.

Selanjutnya untuk mengetahui efektifitas sistem pendistribusian Raskin (beras bersubsidi untuk rumah tangga) di kelurahan sorek satu kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan di tetapkan beberapa indikator yang relevan, yang pembahasannya dapat di jelaskan sebagai berikut :

5.2.1 Tepat Waktu

Menurut pedoman umum Raskin yang di terbitkan oleh Mentri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Raskin di distribusikan sebanyak 12 kali dalam setahun. Itu berarti raskin di distribusikan 1 kali dalam sebulan, namun temuan di lapangan Raskin di distribusikan sebanyak 3 bulan sekali dengan jadwal pendistribusian yang tidak dapat di tentukan. Hal ini menjadikan RTM penerima Raskin tidak dapat memastikan kapan mereka mendapatkan Raskin.

Dari kuesioner yang telah di bagikan oleh para responden tentang ketepatan waktu pendistribusian Raskin terlihat jelas bahwa pendistribusian Raskin di kelurahan Sorek Satu belum memiliki ketepatan waktu, hal ini dapat lebih lanjut di lihat pada tabel berikut :

Tabel 5.5 : Persentase Jawaban Responden Terhadap Indikator Tepat Waktu

No	Indikator	Alternatif Jawaban					Jumlah
		SS	S	CS	KS	TS	
1.	Tepat Waktu	131	29	22	184	269	635
Persentase		4,72%	6,30%	17,32%	48,03%	23,63%	100%

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa 269 orang responden menjawab tidak setuju atau sebanyak 23,63%, responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 184 orang atau 48,03%, responden yang menjawab cukup setuju sebanyak 22 orang atau 17,32%, responden yang menjawab setuju sebanyak 29 orang atau 6,30% dan responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 131 orang atau 4,72%. Jadi dapat disimpulkan bahwa lebih banyak responden yang menjawab tidak setuju jika dikatakan pendistribusian Raskin telah dilaksanakan tepat waktu.

Ini terlihat jelas bahwa para RTM memang sangat membutuhkan beras Raskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, maka dari itu mereka lebih setuju jika Raskin didistribusikan sebanyak sebulan sekali. Pernyataan ini juga terlihat jelas dari jawaban para responden yang menjawab pernyataan pada kuesioner yang menyatakan sebaiknya Raskin di kelurahan Sorek Satu didistribusikan tiap bulannya.

Setelah dilakukannya penelitian di Perum Bulog, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kelurahan Sorek Satu, RTM-PM. Diditemukan bahwa sebenarnya masalah ini sangat terkait dengan sistem pembayaran yang ada.

Dari hasil wawancara yang dilakukan di kantor Perum Bulog Jl. Cut Nyak Dien pada tanggal 30 November pukul 11.00 WIB dengan Ketua Satker Kabupaten Pelalawan Raskin Provinsi Riau yang mendistribusikan Raskin ke Kabupaten Pelalawan, beliau mengatakan bahwa pihak Bulog akan mendistribusikan Raskin setelah pihak Kecamatan menginformasikan untuk

segera mendistribusikan Raskin ke kecamatan. Pihak Bulog juga menetapkan sistem pembayaran di muka, yang artinya pihak kecamatan harus menyiapkan uang untuk kemudian mentransfernya ke rekening Perum Bulog sesuai dengan jumlah beras Raskin yang di distribusikan ke Kecamatan Pangkalan Kuras.

Sedangkan pihak kecamatan sendiri terkadang memiliki keterlambatan dalam mengumpulkan uang dari tiap kelurahan atau desa sekecamatan pangkalan kuras, mengingat pangkalan kuras sendiri memiliki 12 desa/ kelurahan. Dan pihak Desa/kelurahan pun harus mengumpulkan uang dari setiap RT di Desa/Kelurahanya. Untuk kelurahan Sorek Satu sendiri memiliki 29 RT. Dan menurut pengakuan dari beberapa RT yang saya wawancarai, mereka mengaku cukup kesulitan untuk menyetor uang beras Raskin tersebut pada pihak Kelurahan Sorek Satu. Karena mereka harus menutupi tagihan beras Raskin sesuai dengan berapa RTM-PM Yang ada di wilayah RT yang ia pimpin. Dalam penyelesaian pembayaran beras dapat di bayangkan berapa lama waktu yang di butuhkan untuk bisa menyetorkan uang pada pihak Bulog. Dalam pedoman umum program Raskin kabupaten Pelalawan Tahun 2012 pada bab 4 tentang mekanisme pelaksanaan pada point 4.5 pembayaran harga penjualan beras di nyatakan bahwa pelaksana distribusi Raskin tidak di benarkan menunda pembayaran harga pembelian beras raskin kepada satker Raskin atau rekening HPB Bulog di bank. Namun hal ini ternyata tidak berlaku di kecamatan pangkalan kuras karena ketidak sanggupan RTM dalam memenuhi pembayaran beras Raskin yang di dapatkannya.

Pihak Perum Bulog mengaku sengaja memberlakukan sistem seperti itu karena banyak kasus di kabupaten lain yang sampai sekarang masih memiliki tunggakan dalam pembayaran Raskin. Jadi Perum Bolog memberlakukan cara ini untuk mengantisipasi kerugian yang lebih besar lagi.

Dari hasil observasi penulis didapatkan Ketidak tepatan dalam pendistribusian Raskin juga di sebabkan kerena kecamatan tidak memiliki gudang untuk menampung Raskin yang di distribusikan oleh Perum Bulog. Selama ini beras yang ada hanya di tampung di rumah dinas kecamatan, jadi pihak kecamatan cukup kerepotan dalam menampung Raskin yang ada. Apalagi jarak antara Perum Bulog dengan Kecamatan Pangkalan Kuras cukup jauh, jika perum Bulog pagi hari berangkat untuk mendistribusikan Raskin maka sore harinya baru tiba di kecamatan Pangkalan Kuras, setibanya di Pangkalan Kuras pihak kecamatan tidak bisa langsung mendistribusikan Raskin ke desa-desa / kelurahan kerena terkendala dengan waktu, susahnya mencari pekerja untuk membongkar muatan serta kesiapain dari aparat desa/ kelurahan itu sendiri. Jadi beras tersebut untuk sementara di letakkan diperumahan dinas kecamatan yang kapasitasnya juga tidak memadai untuk menyimpan Beras Raskin yang ada.

Pelaksana distribusi Raskin di kecamatan menyatakan bahwa biaya operasional dari pemerintah kabupaten yang di berikan kepada kecamatan untuk mendistribusikan Raskin ke seluruh desa/ kelurahan yang ada di kecamatan Pangkalan Kuras di keluarkan 3 bulan sekali. Maka pendistribusian Raskin tidak dapat di distribusikan tiap bulannya. Inilah yang menjadi salah satu penyebab ketidak tepatan waktu dalam pendistribusian Raskin. Sehingga RTM tidak dapat

memastikan kapan bisa mendapatkan Raskin untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. RTM hanya bisa menunggu informasi dari ketua RT yang ada di wilayahnya kapan Raskin datang untuk selanjutnya di distribusikan pada RTM.

5.2.2 Tepat Sasaran

Di Kelurahan sorek satu memiliki 203 RTM-PM pada tahun 2011 yang tercantum dalam DPM. 203 RTM-PM ini tersebar dalam 9 RW dan 29 RT yang ada di kelurahan sorek satu. 203 RTM-PM ini merupakan hasil pendataan dari BPS kabupaten pelalawan berdasarkan data PPLS-08.

Data RTS yang dinamis menjadi suatu kendala tersendiri di lapangan. Masih ada RTM di lain yang belum dapat menerima Raskin karena tidak tercatat sebagai RTM di BPS. Kebijakan lokal dan “keikhlasan” sesama RTM dalam berbagi, tidak jarang di persalahkan sebagai ketidak tepatan sasaran. Di bawahan ini di sajikan tabel yang akan menggambarkan jawaban dari responden tentang indikator tepat sasaran pendistribusian Raskin yang ada di kelurahan Sorek Satu.

Tabel 5.6 : Persentase Jawaban Responden Terhadap Indikator Tepat Sasaran

No	Indikator	Alternatif Jawaban					Jumlah
		SS	S	CS	KS	TS	
1.	Tepat Sasaran	163	128	24	129	191	635
Persentase		25,67%	20,16%	3,78%	20,31%	30,08%	100%

Sumber : Data Olahan 2012

Tabel tersebut telah mampu menggambarkan bahwa 191 orang responden atau 30,08% menjawab tidak setuju, 129 orang responden menjawab kurang setuju atau 20,31%, 24 orang responden menjawab cukup setuju atau 3,78%, 128 orang menjawab setuju dengan persentase 20,16% dan 163 orang menjawab sangat setuju atau sebanyak 25,67%. Jadi dapat disimpulkan bahwa lebih banyak responden yang menjawab tidak setuju dengan pernyataan dalam kuesioner yang menyatakan bahwa pendistribusian Raskin telah dilaksanakan dengan tepat sasaran.

Para ketua RT yang ada di kelurahan Sorek Satu mengambil kebijakan untuk membagi rata beras Raskin pada tiap KK yang ingin membelinya, hal ini dilakukan untuk menghindari kecemburuan sosial antar masyarakat dan menghindari keributan yang bisa saja terjadi. Menurut wawancara yang telah saya lakukan dengan ketua RT 03 RW 04 Kampung Baru Bapak Heri di kediamannya pada tanggal 15 November 2012 mengatakan bahwa, “ kebijakan seperti ini memang harus diambil agar tidak ada keributan yang ditimbulkan akibat pendistribusian yang tidak merata, terkadang ada KK yang tidak terdaftar di kelurahan sebagai penerima Raskin tapi mereka tetap ngotot untuk mendapatkan Raskin”.

Hal yang sama juga diutarakan oleh ketua RT 03 RW 09 Engkolan Bapak Afini Efri, beliau juga mengatakan terpaksa melakukan hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di wilayahnya.

Kuantitas Raskin yang didapat per RT sebenarnya telah sesuai dengan jumlah RTM di tiap RT, namun beras Raskin yang diterima tiap RT ini harus dibagikan tidak hanya untuk RTM yang terdaftar di DPM kecamatan maupun kelurahan tapi juga pada KK yang tidak terdaftar. Ini karena beberapa KK yang ada di kelurahan Sorek Satu merasa layak untuk mendapatkan beras Raskin, padahal secara financial mereka jauh lebih mampu dibandingkan dengan RTM yang terdaftar di DPM. Inilah yang menjadi penyebab RTM harus rela berbagi dengan yang lain karena paradigma di masyarakat itu sendiri ternyata sangat buruk. Mereka merasa pantas mendapatkan beras Raskin, padahal ada orang yang jauh lebih membutuhkannya.

Sedangkan musyawarah kelurahan yang diadakan tiap setahun sekali oleh pihak Kelurahan yang menghadirkan seluruh RT, RW dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kelurahan Sorek Satu ternyata belum mampu menanggulangi masalah pendataan RTM yang ada, menurut penuturan para RT sendiri mereka tidak mengetahui dengan jelas bagaimana menentukan tingkat kemiskinan dari masyarakat yang ada di wilayahnya. Selama ini mereka hanya menilai dari sisi perekonomian dan kedekatan personal yang tidak mendasar sehingga terkadang ada KK yang lebih miskin tetapi mereka tidak mendapatkan Raskin. Ini merupakan hasil dari observasi penulis yang dilakukan di lapangan.

BPS sendiri telah memiliki indikator untuk mendata kemiskinan tersebut.

Indikator kemiskinan diukur dengan ukuran makro dan ukuran mikro. Ukuran makro meliputi :

1. Pengeluaran perkapita
2. Pendapatan

Sedangkan ukuran mikro meliputi:

1. Pekerjaan
2. Penghasilan
3. Bangunan rumah
4. Sumber air
5. Bahan bakar memasak
6. Aset yang dimiliki
7. Pangan
8. Pakaian
9. Lantai rumah
10. Dinding rumah
11. Atap rumah
12. Dan sumber penerangan

Jadi sebenarnya BPS telah melakukan tugasnya dengan cukup baik akan tetapi angka kemiskinan ini terus meningkat seiring berjalannya waktu. Di kelurahan sorek satu sendiri banyak pendatang dari luar kota maupun luar provinsi yang hingga kini banyak yang belum terdata sehingga tak heran jika ternyata di lapangan masih banyak keluarga miskin yang tidak terdata oleh BPS. Kerena BPS sendiri melakukan kerja sama dengan pihak kecamatan dan kelurahan untuk melakukan pendataan tiap tahunnya. Pegawai BPS kabupaten pelalawan sendiri

mengakui bahwa kendala pendataan keluarga miskin di lapangan ternyata banyak yang tidak jujur, langkah-langkah pendataan yang dilakukan BPS adalah (Hasil wawancara dengan anggota BPS kabupaten Pelalawan):

- a. Pegawai BPS berkordinasi dengan aparat desa/kelurahan untuk mengumpulkan KK miskin menurut penilaian dari aparatur Desa/Kelurahan
- b. Dari tiap KK tersebut di kumpulkan di suatu tempat untuk kemudian di wawancarai oleh pegawai BPS berdasarkan indikator-indikator yang telah di sebutkan di atas.
- c. Dari hasil wawancara tersebut maka pegawai BPS akan menilai dan menentukan KK yang termasuk dalam indikator kemiskinan tersebut
- d. Kemudian pegawai BPS akan memberi angket untuk tiap KK yang termasuk dalam indikator kemiskinan
- e. BPS akan mengolah data yang di dapat dari lapangan.

Data yang dikeluarkan BPS belum mencakup warga miskin di daerah tersebut. Masih banyak warga yang seharusnya layak menerima raskin tidak terdata. Hal ini berdampak pada jumlah yang seharusnya diterima oleh masyarakat menjadi berkurang karena harus berbagi dengan mereka yang tidak terdata. Maka muncullah fenomena “warga miskin ikhlas berbagi”. Jika kita melihatnya secara hukum positif maka jelas hal ini melanggar aturan sebab tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang telah di tetapkan. Akan tetapi jika dilihat dari kacamata sosiologis maka hal tersebut ‘terpaksa’ harus dilakukan demi untuk

meredam gejolak sosial. Fenomena ini ternyata berdampak juga pada ketidaktepatan harga.

Dalam pendistribusian Raskin ketidaktepatan dalam menentukan sasaran penerima manfaat juga dikarenakan terlalu kompleksnya pihak-pihak yang dilibatkan dalam implementasi program Raskin. Pada akhir tahun 2011 dibentuk TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Dan pada tahun 2012 pemerintah membuat kebijakan baru dalam sistem pendataan rumah tangga sasaran penerima manfaat Raskin dengan mengacu pada data yang diberikan oleh TNP2K yaitu sistem basis data terpadu program perlindungan sosial yang mencapai 40% dari jumlah penduduk. Setiap program dalam kluster perlindungan sosial harus menetapkan kriteria kepersertaan dan mengajukan ke TNP2K untuk diproses dan ditentukan jumlah pesertanya atau rumah tangga sasaran penerima Raskin. Sistem ini diharapkan semua RTM dapat menjadi RTS dan tidak menimbulkan kesenjangan data.

Namun fakta di lapangan berkata lain, dari hasil wawancara dengan pelaksana distribusi kabupaten Bapak Erwan selaku Kasubbag produksi pada bagian ekonomi sekretariat daerah kabupaten pelalawan di kantornya pada tanggal 7 Desember 2012 pukul 11.00 WIB menyatakan bahwa “ada perbedaan yang sangat jauh sekali antara data TNP2K dengan data dari BPS, dari data yang ada TNP2K ternyata cenderung menekan angka kemiskinan yang ada sekitar 50%. Inilah yang kadang membuat kami sebagai petugas Raskin kabupaten bingung. Perbedaan data ini bisa jadi akan menimbulkan gejolak di masyarakat”.

5.2.3 Tepat Jumlah

Di pedoman umum Raskin tahun 2011 yang di terbitkan Mentri Koordinator Kesejahteraan Rakyat tercantum bahwa tiap RTM menerima 15 Kg/bulannya atau 180 Kg/ tahun, akan tetapi karena mekanisme pendistribusian Raskin di kelurahan sorek satu tidak sesuai dengan RTM yang terdaftar di DPM. Hal ini berkaitan dengan apa yang telah di uraikan sebelumnya. Tiap RTM harus ikhlas berbagi dengan yang lain, ini menyebabkan hak mereka harus di kurangi. Dari observasi di lapangan, di temukan bahwa tiap RTM hanya mendapatkan 10 Kg/3 Bulannya. Seharusnya mereka menerima 45 Kg/3 bulannya tetapi mereka harus rela berbagi dengan yang lainnya atas kebijakan RT setempat. Dari fakta yang ada, di indikasikan terjadinya pengurangan hak RTM dalam pendistribusian yang ada di kelurahan sorek satu. Padahal dalam pedoman umum program Raskin kabupaten Pelalawan tahun 2012 yang di terbitkan oleh bupati pelalawan pada bab 4 tentang mekanisme pelaksanaan point 4.4 tentang pendistribusian menyatakan bahwa pelaksana distribusi Raskin menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15kg/RTS/bulan dan dicatat dalam DPM-2 selanjutnya DPM-2 di laporkan kepada tim Raskin Kecamatan. Dan pada point selanjutnya juga menyatakan bahwa apabila di titik bagi (TB) jumlah RTS melebihi data RTS-PM hasil PPLS-11 BPS maka pokja Raskin tidak di perkenankan untuk membagi Raskin kepada rumah tangga yang tidak terdaftar dalam DPM-I.

Dari pedoman umum tersebut sebenarnya telah jelas bahwa Pokja tidak memiliki wewenang untuk membagika Raskin pada rumah tangga yang tidak terdaftar di DPM-1 namun yang terjadi di lapangan lain. Ini berarti telah ada

penyalahgunaan wewenang walaupun sebenarnya yang di lakukan bermaksud untuk bisa menekan gejala konflik di masyarakat.

Bervariasinya jumlah beras Raskin yang di terima RTM juga di sebabkan oeh tingkat kemampuan tiap RTM yang berbeda-beda. Terkadang ada beberapa RTM yang tidak mampu membayar beras Raskin yang di terimanya sehingga ia harus menjualnya pada orang lain. Berikut ini tabel persentasi jawaban responden terhadap indikator tepat jumlah

Tabel 5.7 : Persentasi Jawaban Responden Terhadap Indikator Tepat Jumlah

No	Indikator	Alternatif Jawaban					Jumlah
		SS	S	CS	KS	TS	
1.	Tepat Jumlah	168	22	20	200	225	635
Persentase		26,46%	3,46%	3,15%	31,50%	35,43%	100%

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa ternyata 225 orang atau 35,43% responden menjawab tidak setuju, 200 orang responden menjawab kurang setuju atau sebanyak 31,50%, 20 orang responden menjawab cukup setuju atau sebanyak 3,15%, 22 orang responden menjawab setuju atau sebanyak 3,46% dan 168 orang responden menjawab sangat setuju atau sebanyak 26,46%. Jadi dapat disimpulkan bahwa lebih banyak responden yang menjawab tidak setuju.

Dan yang lebih mengherankan lagi dari hasil wawancara dengan ketua RT 03 RW 04 Kampung Baru tanggal 15 November 2012 di kediamannya mengatakan,

“Terkadang ada RTM yang tidak mau menerima beras Raskin, karena kualitas beras yang tidak bagus, jadi jatah beras Raskin yang tidak diambil tersebut harus dijual pada orang lain untuk menutupi uang yang telah saya setorkan ke kelurahan
“.

5.2.4 Tepat Administrasi

Tepat administrasi ketepatan dalam menyiapkan laporan-laporan yang dilakukan oleh aparat kelurahan yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Sorek satu. Dari observasi yang dilaksanakan di kelurahan Sorek Satu, penulis menyimpulkan bahwa masih belum mampu menyiapkan laporan-laporan maupun berkas-berkas seperti DPM, DPM-1, Berita Acara Muskel Kelurahan dan lain-lainnya. Itu terlihat saat penulis menanyakan berkas-berkas atau laporan tersebut, ternyata laporan-berkas tersebut belum siap diketik. Hal ini juga terjadi pada pengarsipan laporan atau berkas-berkas yang berkaitan dengan Raskin tahun-tahun sebelumnya, ketika penulis menanyakannya ternyata berkas-laporan tersebut sudah tidak ada.

Menurut pedoman umum program Raskin tahun 2012 yang diterbitkan oleh Bupati Pelalawan, pada bab 2 tentang pengelolaan dan pengorganisasian pada point 2.5 pelaksana distribusi Raskin di desa/kelurahan/ pemerintah setempat dijelaskan bahwa tugas dari pelaksana pendistribusian Raskin di desa/kelurahan/pemerintah setempat bertugas untuk memeriksa, menerima, dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HPB serta menyelesaikan

administrasi. Tapi tampaknya hal ini belum mampu di realisasikan dengan baik oleh pelaksana distribusi Raskin di desa/ kelurahan.

Sedangkan persyaratan administrasi yang di bebaskan kepada RTM yang terdaftar di DPM, para RTM mengaku tidak ada di bebaskan untuk melengkapi persyaratan apapun untuk mendapatkan beras Raskin di Kelurahan Sorek Satu. Berikut tabel dari kuesioner yang telah di sebar oleh tiap responden tentang pernyataan kemudahan proses administrasi untuk mendapatkan beras Raskin.

Tabel 5.8 : Persentasi Jawaban Responden Terhadap Indikator Tepat Administrasi

No	Indikator	Alternatif Jawaban					Jumlah
		SS	S	CS	KS	TS	
1.	Tepat Administrasi	452	164	0	1	18	635
Persentase		71,18%	25,83%	0%	0,16%	2,83%	100%

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel di atas untuk indikator tepat administrasi, sebanyak 452 responden sangat setuju atau sebanyak 71,18%, sedangkan yang menjawab setuju sebanyak 164 orang atau 25,83%, tidak ada responden yang menjawab cukup setuju, 1 orang responden menjawab kurang setuju atau sebanyak 0,16% dan 18 orang responden yang menjawab tidak setuju atau sebanyak 2,83%. Jadi dapat di

simpulkan bahwa lebih banyak responden yang menjawab sangat setuju pada pertanyaan di kuesioner pada indikator tepat administrasi.

Dari hasil observasi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti, memang RTM yang terdata di DMP tidak di mintai persyaratan apapun untuk bisa mendapatkan beras Raskin di kelurahan Sorek Satu. Dengan demikian sebagian besar dari para responden berpendapat bahwa proses administrasi yang mudah untuk mendapatkan Raskin.

5.2.5 Tepat Harga

Ketepatan harga terkendala dengan biaya transportasi , upah timbang dan penyediaan kantong plastik oleh RT. Jauhnya lokasi RTS dari Titik Distribusi mengakibatkan RTS harus membayar lebih untuk mendekatkan beras ke rumahnya. Harga tebus Raskin oleh RTS tidak lagi seharga Rp.1.600/kg atau karena RTS harus membayar biaya-biaya lain untuk operasional dan angkutan dari Titik Distribusi (TD) ke rumah mereka. Peran Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membantu RTS mencapai tepat harga perlu terus didorong. Saat ini sudah banyak Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyediakan dana APBD-nya untuk Raskin.

Variasi harga yang ada merupakan kebijakan dari tiap RT, jadi dapat dipastikan jika di tiap RT memiliki harga yang berbeda-beda. Ini diakui oleh beberapa RT yang saya jumpai, mereka mengatakan harus menaikkan harga beras untuk biaya transportasi, upah timbang dan kantong plastik. Harga yang di jual bervariasi sekitar Rp.2.100-Rp.2300. Seharusnya pemerintah daerah telah

menyiapkan biaya operasional untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga beras Raskin. Jika setiap oknum-oknum memiliki wewenang tersendiri untuk menentukan harga beras maka ini dapat menjadi penyalahgunaan wewenang terhadap pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan di balik pendistribusian Raskin di kelurahan Sorek Satu.

Tabel 5.9 : Persentase Jawaban Responden Terhadap Indikator Tepat Harga

No	Indikator	Alternatif Jawaban					Jumlah
		SS	S	CS	KS	TS	
1.	Tepat Harga	16	2	18	208	391	635
Persentase		2,52%	0,31%	2,84%	32,76%	61,57%	100%

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel di atas untuk indikator tepat harga, 16 orang responden menjawab sangat setuju atau 2,52%, 2 orang responden menjawab setuju atau 0,31%, 18 orang responden menjawab cukup setuju atau 2,84%, 208 responden menjawab kurang setuju atau 32,76% dan 391 orang menjawab tidak setuju atau 61,57%. Dengan demikian sebagian besar dari para responden berpendapat tidak setuju dengan pernyataan tentang tepat harga yang ada di kuesioner

Harga tebus Raskin cenderung mengalami peningkatan antara 10-25 persen dari pagu yang ditetapkan (Rp. 1.600/kg) sebab masyarakat penerima masih harus dibebani dengan ongkos pengepakan ulang setelah beras dibagi. Disamping itu naiknya harga tebus raskin juga disebabkan oleh ongkos angkutan yang harus ditanggung oleh penerima raskin. Dalam Pedoman Umum Raskin

yang dikeluarkan oleh Kementrian Koordinator Kesejahteraan Sosial (Menko Kesra) disebutkan bahwa Perum Bulog hanya menanggung biaya operasional dari gudang Bulog sampai ke Titik Distribusi (Kelurahan/desa). Selanjutnya dari Titik Distribusi sampai ke penerima raskin menjadi beban Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun hampir semua Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia tidak menyediakan biaya operasional ini, sehingga biaya ini ditanggung penerima Raskin.

Titik distribusi yang di tetapkan pun di rasa terlalu jauh untuk di jangkau oleh RTM sehingga harga tebus beras yang harus di bayar di titik bagi relatif lebih besar di banding dengan harga beras di titik distribusi. Di kabupaten pelalawan titik distribusi terletak di kecamatan, hal ini merupakan MOU antar pihak Bulog dan pemerintah kabupaten pelalawan. Di dalam kesepakatan bersama nomor : 500/EK/2012/25 antara bupati pelalawan dengan kepala Perum Bulog Dive Riau tentang penetapan titik distribusi pelaksanaan program raskin tahun 2012 di kabupaten Pelalawan pada pasal pertama point 3 di jelaskan bahwa titik distribusi adalah tempat di desa/kelurahan yang di sepakati secara tertulis antara pemerintah kabupaten pelalawan dengan devisi regional sebagai tempat penyerahan beras oleh satgas Raskin kepada pelaksana distribusi ahir. Dan pada pasal ke 3 pada point ke 3 di muat dasar pertimbangan penetapan titik distribusi. Di antaranya :

- a. Tempat tinggal penerima manfaat sebagian besar di daerah pedesaan/ kelurahan yang sulit di jangkau melalui darat.

- b. Untuk mempercepat dan kelancaran pengiriman beras oleh satgas Raskin (Divre provinsi Riau) perlu di tetapkan lokasi titik distribusi yang dapat di jangkau dengan darat.
- c. Lokasi yang dapat di jangkau dengan angkutan darat adalah kantor camat dan beberapa kantor kepala desa.

Dengan beberapa pertimbangan tersebut maka pemerintah kabupaten dan pihak Bulog lokasi titik distribusi di tetapkan sebanyak 14 titik distribusi yaitu dan untuk kecamatan pangkalan kuras titik distribusinya terletak di kantor camat pangkalan kuras.

Memang kendala geografis menjadi alasan dalam pementuan titik distribusi, mengingat di kabupaten pelalawan wilayahnya tidak hanya di daratan saja namun juga di perairan. Sehingga efesiensinya lebih di perhitungkan lagi.

5.2.6 Tepat Kualitas

Permasalahan lain yang selalu menjadi kisah klasik adalah kualitas raskin. Selalu menjadi cerita dan berita dimana-mana termasuk di kelurahan Sorek Satu, bahwa kualitas raskin tidak layak dikonsumsi. Hal ini kemudian menjadikan mereka para penerima raskin harus mencampurnya dengan beras yang berkualitas bagus. Atau menukar raskin tersebut dengan beras yang layak dikonsumsi. Kondisi ini tentu saja menambah pengeluaran RTM, dengan membeli beras yang lebih bagus untuk menjadi campuran dari beras Raskin yang di dapat.

Tabel 5.10 : Persentase Jawaban Responden Terhadap Indikator Tepat Kualitas

No	Indikator	Alternatif Jawaban					Jumlah
		SS	S	CS	KS	TS	
1.	Tepat Kualitas	65	32	29	168	341	635
Persentase		10,24%	5,04%	4,57%	26,45%	53,70%	100%

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel 5.13 di atas tepat kualitas beras Raskin yang di distribusikan di kelurahan Sorek Satu, 65 orang responden menjawab sangat setuju atau 10,24%, 32 responden menjawab setuju atau sebesar 5,04%, 29 orang responden menjawab cukup setuju atau 4,57%, 168 orang responden menjawab kurang setuju atau sebanyak 26,45% dan 341 orang responden menjawab tidak setuju atau sebanyak 53,70% Dengan demikian sebagian besar dari para responden berpendapat kualitas beras yang di distribusikan kurang bagus

Hal tersebut jika dilihat dari tujuan awal program raskin adalah mengurangi pengeluaran tidak tercapai sebab justru pengeluaran masyarakat menjadi meningkat karena harus membeli beras lagi untuk campuran atau untuk tambahan konsumsi.

Dari hasil observasi di lapangan, memang penulis menemukan beberapa kasus yang di temukan tentang kurang bagusnya kualitas beras yang di distribusikan karena sebagian besar dari penerima manfaat atau RTM adalah mereka yang berumur antara 61 tahun atas yaitu mencapai 18,90% dari 127 responden yang ada. Beberapa responden mengeluhkan tentang kualitas beras Raskin yang ada, apabila beras tersebut dimasak maka beras tersebut bertekstur

keras sehingga harus dicampur dengan kualitas beras yang sedikit lebih baik agar bisa dikonsumsi. Mereka yang berusia lanjut memang agak sedikit kesulitan untuk mengonsumsi beras tersebut.

5.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas sistem pendistribusian Raskin di kelurahan Sorek Satu

Di bawah ini penulis menguraikan empat faktor yang mempengaruhi efektifitas, yang di kemukakan oleh Van Mater dan Van Horn (1997:78). Van Mater dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan di laksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja .

Model implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh Van Mater dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi kebijakan di pengaruhi oleh beberapa variabel yang saling terkait, di antaranya adalah :

5.3.1 Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pusat perhatian ada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan sangat di pengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Hal ini terkait dengan konteks kebijakan yang akan di laksanakan pada beberapa kebijakan di tuntut pelaksana

kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain di perlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Program Raskin merupakan kebijakan nasional yang menyentuh seluruh wilayah di indonesia, luasnya cakupan wilayah dalam pengimplementasian Raskin ini menuntut agen pelaksana yang terkait dalam organisasi formal. Agen pelaksana yang di butuhkan pun sangat banyak dan kompleks dengan melibatkan beberapa organisasi formal di dalamnya.

Dalam sistem pendistribusian yang ada di Kelurahan Sorek Satu ini memiliki susunan atau struktur organisasi yang sangat kompleks, melibatkan Perum Bulog, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kelurahan dan aparat kelurahan seperti RT yang tersebar di 9 RW ditambah lagi pada tahun 2012 pemerintah mengambil kebijakan dengan melibatkan TNP2K. Ini menyebabkan panjangnya proses pendistribusian Raskin untuk sampai ke tangan RTM. Struktur organisasi yang kompleks ini juga menjadikan pendistribusian Raskin rawan akan penyelewengan wewenang sehingga indikasi terjadinya kesalahan lebih besar. Seharusnya Penanggung jawab distribusi beras mulai dari pengadaan sampai penyaluran kepada masyarakat harus dipegang oleh satu lembaga sehingga tugas, tanggung jawab, dan penilaian kinerjanya menjadi jelas. Jadi tidak ada aksi saling menyalahkan apabila ada kesalahan atau kecurangan dalam pendistribusian Raskin. Akuntabilitas dari program Raskin yang di jalankan pun menjadi jelas, hemat waktu serta tidak berbelit-belit karena hanya melibatkan satu pihak saja. Pemerintah pun mudah dalam melakukan pengawasan terhadap program Raskin.

5.3.2 Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dan kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Dalam pendistribusian Raskin ini kebijakan yang sering diambil baik oleh pihak pemerintah kabupaten, kelurahan maupun aparat kelurahan sangat mempengaruhi tingkat efektifitas sistem pendistribusian Raskin yang ada. Untuk pemerintah kabupaten sendiri telah membuat kebijakan berupa Pedoman umum Program Raskin Kabupaten Pelalawan, ini merupakan peraturan yang di buat oleh bupati untuk menjabarkan pelaksanaan program Raskin di Kabupaten yang harus di sesuaikan dengan Pedoman Umum Raskin yang di terbitkan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Di dalam Pedoman umum Program Raskin ini menjadi pedoman di Kabupaten untuk melaksanakan Raskin. Pemerintah juga telah melakukan MOU dengan pihak Perum Bulog untuk menentukan titik distribusi Raskin. Penentuan titik distribusi yang telah di lakukan di rasa kurang tepat karena titik distribusi tersebut terlalu jauh dari jangkauan RTM. Sehingga RTM masih banyak di bebaskan biaya operasional, ini berakibat dengan harga beras Raskin yang melonjak. Sedangkan lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi. Hal ini berkaitan dengan strukrur organisasi yang ada, yang menggambarkan keadaan di dalam oganisasi untuk iklim organisasi yang ada di perum Bulog,pemerintah kabupaten, kecamatan dan kelurahan sorek satu sudah

cukup bagus dari hasil penelitian penulis hanya kerja sama tim yang kurang di kembangkan sehingga sering terjadi penumpukan tugas karena ada beberapa pegawai yang bersikap acuh.

Sedangkan lingkungan sosial masyarakat sendiri banyak yang belum mengetahui bagaimana sebenarnya program Raskin tersebut baik mekanisme maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehingga banyak masyarakat yang menuntut untuk mendapatkan Raskin padahal mereka tidak terdaftar di DPM. Mereka memiliki paradigma sendiri dalam menentukan tingkat kemiskinan itu. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi yang di lakukan baik dari pelaksana distribusi kabupaten maupun kelurahan. Sehingga masyarakat salah tanggap atau salah mengartikan program Raskin tersebut.

5.3.3 Sikap Para Pelaksana

Merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektifitas kebijakan . Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

Karakteristik pekerja yang terlibat dalam pendistribusian Raskin ini sangat menentukan tingkat efektifitas dari sistem pendistribusian Raskin itu sendiri. Menurut penelitian dari penulis sendiri ternyata orang-orang yang berkaitan dengan pendistribusian Raskin belum mampu bekerja secara profesional dan

optimal. Karena tidak adanya semangat kerja dan keterikatan dengan pekerjaannya, sehingga kinerja dari tiap pegawai masih kurang efektif.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dan manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang di isyaratkan oleh kebijakan yang telah di tetapkan secara politik.

Menurut pendapat Van Mater dan Van Horn bahwa sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang di laksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahwa tak mampu menyentuh kebutuhan, atau permasalahan yang harus di selesaikan.

Kebijakan program Raskin yang di laksanakan memang bersifat *top down*, Sehingga pemerintah tidak mengerti apa sebenarnya apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Seperti masalah pendataan masyarakat penerima Raskin. Di lapangan ternyata masih banyak rumah tangga miskin yang tidak terdata, menjadikan timbulnya cemburu sosial dalam masyarakat yang dapat berakibat terhadap timbulnya konflik laten.

Sikap mereka itu di pengaruhi oleh pandangan terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan lebih dahulu mengenai persepsi dari pelaksana dalam batas mana kebijakan itu di laksanakan.

Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan. Kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Pada ahirnya, intensitas disposisi para pelaksana dapat mempengaruhi pelaksana kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

5.3.4 Komunikasi Antar Organisasi Terkait Dan Kegiatan-kegiatan Pelaksana

Agar kebijakan publik bisa di laksanakan dengan efektif menurut Van Mater dan Van Horn yang menjadi standar tujuan harus di pahami oleh para individu. Yang bertanggung jawab terhadap pencapain standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus di komunikasikan kepada para

pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa di capai. Dengan kejelasan ini para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang di harapkan darinya dan tahu apa yang harus di lakukan. Dalam suatu organisasi publik, proses pentransferan berita ke bawah di dalam organisasi dari suatu organisasi ke organisasi lain dan ke komunikator lain sering mengalami gangguan baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama terhadap suatu standar dan tujuan atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan , maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kebijakan yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif sangat di tentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten. Di samping itu koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian pula sebaliknya.

Dari hasil wawancara penulis dengan pelaksana distribusi Raskin dengan pelaksana Raskin tingkat kabupaten, mereka menyatakan bahwa koordinasi

dengan pihak kecamatan maupun Perum Bulog telah di laksanakan dengan baik. Bahkan koordinasi dengan pihak provinsi juga cukup baik. Pemerintah kabupaten selalu menghadiri undangan rapat dari pemerintah provinsi.

Kesiapan dari pihak-pihak yang ditunjuk untuk menangani Program Raskin pun tidak pernah di pertanyakan, sebenarnya ini harus di lakukan agar pihak-pihak yang ditunjuk tersebut merasa benar-benar bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Mekanisme pendistribusian dengan menentukan titik distribusi yang terlalu jauh dari jangkauan RTM juga menjadi kendala dalam pendistribusian Raskin. Seharusnya pemerintah kabupaten Pelalawan dan Perum Bulog mampu membuat MOU untuk menetapkan Titik distribusi yang lebih dekat lagi dengan RTM.

Pendistribusian Raskin merupakan perjalanan panjang yang membutuhkan waktu dan juga biaya operasional yang tidak sedikit, saharusnya pemerintah pusat khususnya Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat menciptakan lingkungan prestasi untuk memberikan implus kepada pemerintah di daerah maupun pihak terkait untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, tetapi hingga saat ini lingkungan prestasi tersebut belum pernah ada. Sehingga tidak mengherankan jika kinerja dari pihak-pihak yang terkait dengan program Raskin ini sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian khusus.

Unit pengaduan masyarakat yang ada di kantor bupati pelalawan tepatnya di bagian perekonomian, telah di aktifkan namun tidak pernah ada keluhan yang di

sampaikan oleh masyarakat. Hal ini diakui oleh pelaksana pendistribusian Raskin Kabupaten pelalawan, bapak Erwan . Beliau menyatakan bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang mengadukan masalah Raskin di kabupaten pelalawan. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi pada RTM yang ada terhadap keberadaan unit pengaduan masyarakat di kantor bupati pelalawan, padahal ini dapat menjadi masukan atau implus bagi pemerintah kabupaten untuk menjadi evaluasi terhadap pendistribusian Raskin.

5.3.5 Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang di isyaratkan oleh kebijakan yang telah di tetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Di tinjau dari kesiapan sumber daya manusia yang ada untuk melaksanakan sistem pendistribusian Raskin di kelurahan sorek satu, ternyata sumber daya manusia yang ada nilai belum memiliki kesiapan baik dari segi kompetensi maupun personalnya. Sehingga pelaksanaan pendistribusia Raskin masih banyak kekurangannya.

Lamanya dana operasional dari kabupaten sampai ke kecamatan juga menjadi kendala dalam pendistribusian Raskin. Van mater dan Van Horn (1997:79) mengatakan :

“Sumber daya kebijakan tidak kalah pentingnya dengan komunikasi, sumber daya kebijakan ini juga harus tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya terdiri atas dana atau intensif lain yang dapat untuk memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau intensif lain dalam implementasi kebijakan adalah merupakan sumbangan terhadap gagalnya implementasi kebijakan”.

Dari pendapat Van Mater dan Van Horn tersebut bahwa memang dana atau intensif sangat di perlukan untuk imlementasi kebijakan. Jika dana dan intensif tersebut tidak tersedia dengan baik maka akan terjadi kegagalan dalam implementasi kebijakan. Dan pendapat ini telah terbukti dangan kurang efektifnya sistem pendistribusian Raskin di kelurahan Sorek Satu.

5.3.6 Standar Dan Sasaran Kebijakan/Ukuran Dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang realistis dengan sosio kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal, maka akan sulit di realisasikan. Van Mater dan Van Horn mengemukakan untuk mengukur kinerja implemtasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapainya standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal ketika para pelaksana

tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan merupakan masalah yang penting. Implementator mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, di karenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

Dari hasil observasi penulis, di temukan adanya indikasi bahwa para pelaksana pendistribusian Raskin baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun kelurahan belum mampu memahami sasaran dan tujuan dari program Raskin yang dilaksanakan sehingga masih banyak terjadi ketidak tepatan dan kurang efektifnya sistem pendistribusian Raskin di kelurahan sorek satu. Tujuan dari program Raskin sendiri menurut pedoman umum Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Dan ternyata tujuan ini belum mampu terealisasi dengan baik karena belum adanya pengurangan jumlah jatah Raskin karena harus berbagi dengan rumah tangga yang lain.

5.4 Upaya Pemerintah Kelurahan Dalam Meningkatkan Efektifitas Pendistribusian Raskin Di Kelurahan Sorek Satu.

Dari hasil penelitian penulis dan berdasarkan observasi di lapangan ternyata dapat disimpulkan bahwa pemerintah kelurahan belum mampu meningkatkan efektifitas pendistribusian yang ada, malah cenderung menghambat efektifitas pendistribusian. Ini terlihat dari seringnya kelurahan sorek satu

menyetorkan uang Raskin dan hal ini juga diakui oleh pihak kecamatan sehingga pihak kecamatan sering kali menutupi keterlambatan tersebut dengan menggunakan uang dari pihak kecamatan.

Ketika di wawancara oleh penulis sendiri, pihak kelurahan hanya mampu menjalankan mekanisme yang ada, tanpa mampu mencari inovasi maupun solusi untuk meningkatkan pendistribusian Raskin tersebut.

Sangat di sayangkan sekali jika ternyata pihak kelurahan sorek satu ternyata belum mampu berupaya meningkatkan efektifitas sistem pendistribusian Raskin, padahal kelurahan merupakan instansi pemerintah yang cukup dekat dengan RTM. Keberadaannya di harapkan mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap RTM yang ada di kelurahan Sorek Satu. Namun harapan itu belum bisa di realisasikan. Semoga harapan itu bisa menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kelurahan di kedepannya.

5.5 Rekapitulasi Jawaban Responden Dalam Setiap Indikator

Secara Keseluruhan rekapitulasi dan analisis hasil penelitian terhadap masing-masing variabel penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5.11 : Rekapitulasi Jawaban Responden

N O.	Indikator	Alternatif Jawaban					Jumlah
		SS	S	CS	KS	TS	
1.	Tepat waktu	131	29	22	184	269	635

2.	Tepat Sasaran	191	128	24	129	163	635
3.	Tepat Jumlah	168	22	20	200	225	635
4.	Tepat Administrasi	452	164	0	1	18	635
5.	Tepat Harga	16	2	18	208	391	635
6.	Tepat Kualitas	65	32	29	168	341	635
Jumlah		1023	377	113	890	278	3810
Jumlah rata-rata		26,85	9,90	7,20	22,44	29,06	100%

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel di atas, dapat di ketahui bahwa 30 pertanyaan dari 6 indikator , tanggapan responden yang menjawab sangat setuju 1023 responden atau 26,85%, , yang menjawab setuju sebanyak 377 responden atau 9,90%, yang menjawab cukup setuju 113 responden atau 7,20%, yang menjawab kurang setuju 890

responden atau sebanyak 22,44%, dan yang menjawab tidak setuju sebanyak 270 responden atau 29,06%.

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan rekapitulasi jawaban responden diatas bahwa persentase yang diperoleh dari tiap indikator kurang dari 30% sehingga dapat dikatakan bahwa efektifitas sistem pendistribusian Raskin di kelurahan sorek satu belum dilaksanakan dengan baik, dikarenakan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang di lakukan penulis mengenai efektifitas sistem pendistribusian Raskin di kelurahan Sorek Satu kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan , maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan sebagai pelengkap nya penulis akan mengemukakan saran untuk bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan.

1.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah di lakukan, ternyata memang banyak sekali di temukan kendala- kendala dalam sistem pendistribusian Raskin di Kelurahan Sorek Satu. Kendala tersebut terjadi akibat kebijakan pemerintah yang kurang tepat, sumber daya manusia yang menjalankan kurang berkompeten dan belum bisa menjaga profesionalitas kerja, pengaruh lingkungan yang tidak kondusif mengakibatkan paradigma berpikir yang sempit serta struktur organisasi yang sangat kompleks. Hal – hal tersebut menjadikan program Raskin yang di laksanakan di kelurahan Sorek Satu belum bisa di katakan efektif dan masih perlu pembenahan agar program mulia dari pemerintah pusat ini tidak mubajir dan menjadi ladang kesempatan bagi oknum-oknum yang ingin mendapatkan keuntungan di balik implementasi program Raskin ini. Hal ini terbukti dengan hasil penelitian yang di lakukan penulis terhadap 6 indikator dari efektifitas program Raskin. Pendistribusian Raskin di kelurahan sorek satu tidak memiliki ketepatan waktu karena terkendala masalah pembayaran. Sistem pembayaran

Raskin yang ditetapkan oleh pihak Bulog mengharuskan pelaksana pendistribusian Raskin kecamatan dan kelurahan harus menyiapkan uang untuk di transferkan ke rekening Bulog sebelum Raskin tersebut di distribusikan ke kelurahan sorek satu. Sedangkan RTM terlambat untuk menyetorkan uang Raskin tersebut. Sehingga ini menambah lamanya waktu pendistribusian Raskin. Sedikitnya rumah tangga miskin yang terdaftar di DPM menyebabkan ketua RT di kelurahan sorek satu harus membagi Rata beras Raskin yang di dapat untuk rumah tangga yang ada di wilayahnya. Hal ini di lakukan untuk menekan konflik atau kecemburuan sosial yang bisa terjadi. Padahal dalam pedoman umum Raskin yang di terbitkan oleh bupati pelalawan tahun 2012 telah di jelaskan bahwa tidak di benarkan membagikan Raskin pada RTM yang tidak terdaftar di DPM-1. Akibat dari kebijakan yang di ambil oleh ketua RT di kelurahan Sorek Satu, maka ada pengurangan jumlah jatah beras Raskin yang seharusnya di terima RTM, karena hak mereka di kurangi untuk di bagi pada RTM yang lainnya. Dari pantauan penulis di lapangan RTM yang terdaftar di DPM hanya mendapat beras hanya mendapat 10kg/3 bulannya seharusnya mereka menerima 45kg/3 bulannya. Dari hasil wawancara dan observasi yang di lakukan penulis, ternyata pelaksana distribusi Raskin di kelurahan belum mampu melaksanakan proses administrasi dengan baik, laporan-laporan maupun berkas berkas seperti DPM, berita acara musyawarah kelurahan belum di selesaikan. Ini terlihat ketika penulis menanyakan tentang hal itu tapi ternyata berkas dan laporan tersebut belum di siapkan. Ketepatan harga Raskin di kelurahan sorek satu terkendala dengan biaya transportasi, upah timbang dan penyediaan kantong plastik. Tidak adanya

penetapan harga yang baku menyebabkan harga yang bervariasi di tiap RT yang ada di kelurahan sorek satu, harga yang ada berkisar antara Rp.2.100-2.300/ kg di titik bagi. Dari hasil penelitian penulis ternyata banyak RTM yang mengeluhkan tentang kualitas beras Raskin, jika di tinjau dari umur para RTM yang berkisar antara 65 tahun ke atas mencapai 28,57% dari 203 RTM yang ada. Mereka mengeluhkan kualitas beras yang teksturnya terlalu keras sehingga sulit untuk di konsumsi. Untuk mengatasi itu mereka terpaksa harus mencampurnya dengan kualitas beras yang lebih bagus agar bisa di konsumsi. Hal ini tentu menambah pengeluaran RTM bukan malah mengurangi.

1.2 Saran

Program Raskin yang sudah berjalan selama empat belas tahun telah menggunakan dana yang cukup besar dan melibatkan banyak pihak, namun hingga saat ini kinerjanya masih belum efektif. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran untuk bisa meningkatkan efektifitas sistem pendistribusian Raskin di kelurahan Sorek Satu di antaranya :

- a. Program Raskin perlu direvitalisasi, antara lain dengan melakukan sosialisasi nasional secara terarah untuk memberikan kesadaran dan pemahaman yang benar mengenai hakikat program ini kepada semua pemangku kepentingan, baik aparat pelaksana maupun masyarakat. Kegiatan sosialisasi tersebut harus diatur secara tegas dalam Pedum.
- b. Pagu jumlah rumah tangga penerima di tingkat nasional harus ditetapkan secara tegas dan sesuai dengan jumlah kelompok sasaran rumah tangga.

Kategori rumah tangga sasaran harus didefinisikan secara jelas, apakah hanya dibatasi untuk kelompok sangat miskin saja, memasukkan kelompok miskin juga, atau menjangkau kelompok hampir miskin juga.

- c. Penanggung jawab distribusi beras mulai dari pengadaan sampai penyaluran kepada masyarakat harus dipegang oleh satu lembaga sehingga tugas, tanggung jawab, dan penilaian kinerjanya menjadi jelas.
- d. Pemda harus bertanggung jawab terhadap pembagian alokasi dan menjamin ketepatan target penerima. Untuk menjamin ketepatan target penerima, pemda melakukan verifikasi dengan mengacu pada data RTM BPS atau data lain yang menjadi acuan penetapan target di tingkat nasional.
- e. Jumlah rumah tangga penerima hasil verifikasi di tingkat desa/kelurahan maksimal sama dengan pagu yang diperoleh, supaya menjamin jumlah beras per rumah tangga sesuai dengan ketentuan. Pengesahan dan penentuan validitas daftar nama target dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab kecamatan.
- f. Perlu pengaturan titik distribusi yang dapat menunjang harga sesuai ketentuan. Letak titik distribusi perlu didekatkan dengan penerima manfaat sehingga bisa sekaligus menjadi titik bagi.
- g. Perlu kebijakan yang dapat memaksa pemda untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin secara serius, baik dalam hal dukungan dana (APBD) maupun target keberhasilan program.

- h. Sistem penghargaan dan hukuman perlu diperkenalkan dan di berlakukan untuk menunjang pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan. Penghargaan diberikan kepada wilayah atau pelaksana program yang berhasil melaksanakan program sesuai aturan dengan mengacu pada indikator tertentu. Penghargaan antara lain dapat berbentuk pemberian anugerah. Adapun hukuman dapat berbentuk pengumuman wilayah yang tidak berhasil di media, pencopotan, pengalihan tugas, dan penurunan pangkat bagi pejabat pelaksana. Untuk menjamin pelaksanaan Program Raskin yang sesuai dengan aturan dan untuk mendukung pelaksanaan sistem penghargaan dan hukuman, monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara serius, terencana, dan bertanggung gugat oleh lembaga eksternal yang independen dan memiliki kredibilitas. Hasil pemantauan harus disampaikan kepada berbagai pihak termasuk publik secara luas dan dimanfaatkan secara sistematis untuk perbaikan pelaksanaan program. Semua ketentuan mengenai pelaksanaan program, seperti tentang sosialisasi, penargetan (verifikasi dan acuan data), monitoring dan evaluasi harus diatur secara jelas dan tegas dalam pedoman program.
- i. Mengaktifkan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) di tingkat kabupaten dan mensosialisasikan UPM tersebut pada seluruh RTM penerima Raskin. Dan alangkah lebih baiknyajika UPM juga di sediakan pada tingkat kelurahan agar lebih menjangau RTM yang ada.
- j. Pemerintah harus menyediakan gudang untuk menampung Raskin yang ada, dengan memperhatikan kapasitas Raskin yang di terima kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijaksanaan*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta: 1997
- BPS. *Pendekatan Program Perlindungan Sosial*. BPS, Jakarta:2008
- Gunawan,hadi. *Kamus besar bahasa Indonesia* 2003
- Indrawijaya, Adam. *Perilaku Organisasi*, Penerbit Sinar Baru, Bandung :2000
- Komorotomo, Wahyudi. *Etika Administrasi Negara*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta :2003
- Moenir, H.A.S. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta : 2005
- Ratminto dan Winarsih Septi. *Manajemen Pelayanan*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta :2005
- Richard M. Steers.*Efektifitas Organisasi*, LLP, Jakarta;1998
- Sigit, Soenardi. *Perilaku Organisasional*, Penrrbit BPFE UST,Yogyakarta :2003
- Singarimbun, Masri, Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Survei*, LP3S Yogyakarta: 2002.
- Stephen P. Robbins, *Teori Organisasi (Struktur, disain, dan Aplikasi) edisi ke 3*, Penerbit Arcan, Jakarta :1994
- Sugiono. *Metode Penelitian Administrasi*, Penerbit Alfabeta,Bandung :2003
- Suharmi, Arikunto. *Prosedur Penelitian*,PT. Rineka Cipta, Jakarta:1996
- Sumardi, I Nyoman. *Efektifitas Implementasi kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta : 2005
- Tafsir Al Hidayah penerbit Karim
- The Liang Gie.*Ensiklopedia Administrasi*, BPA.UGM , Bandung :1996

Peraturan perundang-undangan

Pedoman umum Raskin tahun 2011 dan tahun 2012

Pedoman umum Program Raskin tahun 2012 Kabupaten Pelalawan

Peraturan Bupati Tentang *Penetapan Pagu Alokasi Raskin Di Kabupaten Pelalawan tahun 2012*

Kesepakatan Bersama Antara Bupati Pelalawan Dengan Kepala Perum Bulog Divre Riau Tentang *Penetapan Titik Distribusi Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2012 Di Kabupaten Pelalawan*

(www.pnpm-mandiri.org/elibrary/download.php?id=15 di akses tanggal 11 April 2012)

(www.digilib.itb.ac.id di akses tanggal 11 April 2012)

(www.dikmanum.go.id di akses tanggal 11 April 2012)

http://www.bulog.co.id/alurraskin_v2.php di akses tanggal 20 April 2012

<http://dr-suparyanto.blogspot.com/2011/02/masyarakat-miskin.html> di akses tanggal 23 Januari 2013

<http://khairilanwarsemi.blogspot.com/2011/12/indikator-kemiskinan.html> di akses pada tanggal 23 Januari 2013